

**ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA,  
PENGANGGURAN DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL  
BRUTO TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Di KABUPATEN KOTA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013-2017**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Oleh**

**Muchamad Miftakhudin  
NPM : 1551010075  
Program Studi : Ekonomi Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/2020**

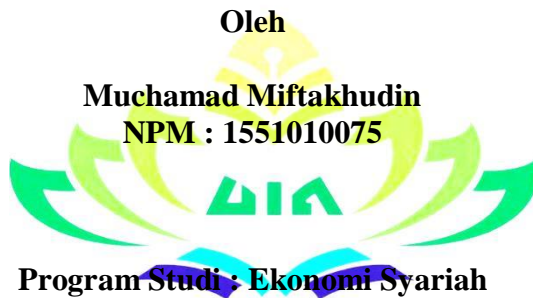
**ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA,  
PENGANGGURAN DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM Di KABUPATEN KOTA PROVINSI SUMATERA  
SELATAN TAHUN 2013-2017**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Oleh**

**Muchamad Miftakhudin  
NPM : 1551010075**



**Program Studi : Ekonomi Syariah**

**Pembimbing 1 : Erike Anggraeni, D.B.A**

**Pembimbing 2 : Gustika Nurmalia, S.E.I.,M.Ek**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H/2020 M**

## ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks. Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan menduduki peringkat ketiga tertinggi sejak tahun 2013-2017 dibandingkan Provinsi lain se-Sumatera. Angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 sebesar 12,95 persen dibawah Provinsi Aceh 14,39 persen dan provinsi Bengkulu 15,54 persen. Dilihat dari kondisi ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan yang mayoritas adalah pertanian dan industri yang mampu mendorong perkembangan ekonomi di provinsi Sumatera Selatan dan menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan sehingga dapat menekan angka kemiskinan. Namun pada kenyaaanya Provinsi Sumatera Selatan masih jauh tertinggal dengan provinsi provinsi lain di Pulau Sumatera.

Menurut teori lingkaran kemiskinan yang dikenalkan oleh Nurkse bahwa yang mempengaruhi tingkat kemiskinan ada tiga yaitu rendahnya IPM, rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya tingkat pengangguran. maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Tingkat Kemiskinan tahun 2013-2017 Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Selatan?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Tingka Kemiskinan tahun 2013-2017 Kabupaten/Kota provinsi Sumatera Selatan baik secara parsial maupun secara simultan, serta bagaimana penanggulan kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini digolongkan kedalam penelitian dokumentasi atau studi pustaka (*Library Research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif menggunakan panel data dengan pendekatan model efek tetap (*Random effect model*). Data yang di gunakan adalah data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis *Random Effect Model* diperoleh hasil bahwa variabel IPM memiliki pengaruh negatif terhadap Jumlah Penduduk miskin, sedangkan variabel Tingkat Pengangguran Terbuka dan Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh terhdapa Jumlah Penduduk Miskin. Secara simultan IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDRB berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin tahun 2013-2017. Islam mendukung kesejahteraan umatnya dengan adanya perintah untuk membangun keadilan, selain itu Islam menganjurkan seluruh umat untuk senantiasa selalu berusaha untuk kesejahteraan dirinya.

**Kata Kunci : IPM, Pengangguran, PDRB, Tingkat Kemiskinan Ekonomi Islam**



**KEMENTRIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

**SURAT PERNYATAAN**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchamad Miftakhudin

NPM : 1551010075

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, PENGANGGURAN DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2013-2017”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, Januari 2020  
Penyusun

**Muchamad Miftakhudin**  
**NPM. 1551010208**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi

**ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN  
MANUSIA, PENGANGGURAN DAN PRODUK  
DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP  
TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN KOTA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2013-2017**

Nama Mahasiswa

: Muchamad Miftakhudin

NPM

: 155100075

Program Studi

: Ekonomi Syariah

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis Islam

**MENYETUJUI**

untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Juni 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Erike Anggraeni, D.B.A**

**NIP. 198208052011012009**

  
**Gustika Nurmalia, S.E.I., M.Ek**

**NIP.**

**Ketua Jurusan**

  
**Madnasir, S.E., M.S.I**

**NIP. 197504242002121001**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung (0721) 703260**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN  
MANUSIA, PENGANGGURAN DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL  
BRUTO TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM DI KABUPATEN KOTA PROVINSI SUMATERA  
SELATAN TAHUN 2013-2017 disusun oleh Muchamad Miftakhudin, NPM:  
1551010075, Program Studi Ekonomi Syari'ah, telah di ujikan dalam sidang  
Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan pada  
Hari/Tanggal/waktu : Selasa, 23 Juni 2020. Pukul. 13.00-15.00 wib**

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua : Madnasir, S.E., M.S.I.**

**Sekretaris : Dania Hellin Amrina, S.E., M.Si**

**Penguji I : Femei Purnamasari, S.E., M.Si**

**Penguji II : Dr. Erike Anggraeni, M.E., Sy**

**Disetujui dan diketahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Dr. Kuslan Ghofur, M.S.I**

**NIP. 198008012003121001**



## MOTTO

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ  
شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٨٠

Artinya “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS : Al Imron : 180).<sup>23</sup>



---

<sup>23</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, AL-Quran dan terjemah..... h.67

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirohim.*

Teriring do'a dan rasa syukur kehadiran Allah SWT, dengan segala ketulusan hati, penulis mempersembahkan Skripsi ini sebagai tanda bukti cinta dan kasih sayang yang tulus kepada :

1. Kepada orang tua saya tercinta, Bapak Sulaeman dan Ibu Marhamah dengan pengorbanan dan doa restunya serta memberikan kasih sayang dan juga telah memperjuangkan studiku dan senantiasa memberikanku motivasi dan keceriaan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi.
2. Keluarga besarku yang selalu memberikan motivasi serta sabar dalam menanti keberhasilanku.
3. Untuk teman-teman Ekonomi Syariah atas do'a dan dukungannya selama ini.
4. Almamater UIN Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bandar Lampung.





## RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugerahi nama oleh Ayah dan Bunda, Muchamad Miftakhudin. Muchamad Miftakhudin merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara. Dilahirkan di Desa Jatisari Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur Sumatera Selatan pada tanggal 23 Maret 1997. Riwayat Pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah :

1. SD Negeri 2 Jatisari, Kec. Madang Suku I , OKU Timur, Sumatera Selatan pada tahun 2009.
2. MTs Nurul Huda Sukaraja, Kec. Buay Madang, OKU Timur, Sumatera Selatan pada tahun 2012.
3. MA Nurul Huda Sukaraja, Kec. Buay Madang, OKU Timur, Sumatera Selatan pada tahun 2015.
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2020.

Bandar Lampung, 24 Januari 2020

Muchamad Miftakhudin  
NPM. 1551010075

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidaya-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, PENGANGGURAN DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2013-2017” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) dalam bidang Ilmu Syariah.

Penulis tak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaian Skripsi ini. Secara rinci penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

2. Madnasir, S.E., M.Si., dan Budimansyah, S.Th.I., M.Kom.I., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syari'ah yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Erike Anggraeni, D.B.A. selaku pembimbing I, dan Gustika Nurmalia, S.E.I., M.Ek selaku pembimbing II yang dengan tulus meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan penulis dan memberi nasehat serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Orang tua terhebat yang penulis cintai Bapak Sulaeman dan Ibu Marhamah dan tak lupa kakak tersayang Imam Santoso dan adik tersayang Santi Ning Salamah yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi. Pimpinan dan karyawan Perpustakaan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.

Bandar Lampung, November 2019  
Penulis,

Muchamad Miftakhudin  
NPM. 1551010075



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

<b>A. Penegasan Judul .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Alasan Memilih Judul .....</b>	<b>3</b>
<b>C. Latar Belakang .....</b>	<b>4</b>
<b>D. Rumusan Masalah.....</b>	<b>12</b>
<b>E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>13</b>

## **BAB II LANDASAN TEORI**

<b>A. Kemiskinan.....</b>	<b>14</b>
1. Pengertian Kemiskinan .....	14
2. Indikator Kemiskinan .....	15
3. Macam-macam Kemiskinan .....	15
4. Penyebab Kemiskinan .....	16
<b>B. Kemiskinan Dalam Perpektif Islam .....</b>	<b>17</b>
1. Pengertian Kemiskinan Dalam Perspektif Islam.....	17
2. Penyebab Kemiskinan Dalam Perspektif Islam.....	23
3. Bahaya Kemiskinan Dalam Perspektif Islam .....	25
4. Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam.....	28

C. Indeks Pembangunan Manusia .....	39
1. Pengertian dan Indikator IPM .....	39
2. Hubungan IPM terhadap Kemiskinan .....	44
3. IPM Dalam Perspektif Islam .....	45
D. Tingkat Pengangguran Terbuka .....	48
1. Pengertian Dan Indikator Pengangguran Terbuka .....	48
2. Teori Pengangguran .....	50
3. Macam-macam Pengangguran .....	51
4. Hubungan Pengangguran Terhadap Kemiskinan .....	55
5. Pengangguran Menurut Perspektif Islam .....	56
E. Produk Domestik Regional Bruto .....	58
1. Pengertian PDRB .....	58
2. Penghitungan Statistik Neraca Nasional .....	60
3. Kegunaan PDRB .....	61
F. Penelitian Terdahulu .....	61
G. Kerangka Pikir .....	64
H. Hipotesis .....	67



### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian .....	71
B. Jenis dan Sumber Data .....	71
C. Metode Pengumpulan Data .....	73
D. Variabel Penelitian dan Definisi Oprasional Variabel .....	74
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .....	76

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

A. Deskripsi Objek Penelitian .....	86
B. Analisis Deskriptif Objek Penelitian .....	90
C. Analisis Regresi Data Panel .....	96
1. Regresi Data Panel .....	96
2. Pemilihan Model Regresi .....	102

3. Pengujian Statistik .....	104
4. Interpretasi Koefisien Random Effect .....	118
D. Pembahasan.....	115

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	129
B. Saran.....	131

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN LAMPIRAN**





## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan .....	7
Tabel 2 Data Kemiskinan di Kabupaten Kota Sumatera Selatan.....	8
Tabel 3 Data IPM Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan.....	9
Tabel 4 Data Pengangguran Terbuka Kabupaten kota Sumatera Selatan	11
Tabel 5 definisi Oprasional Variabel .....	75
Tabel 6 Data PDRB kabupaten kota Sumatera Selatan .....	96
Tabel 7 Regrasi Data Panel Metode <i>Common Effec</i> .....	97
Tabel 8 Regresi Data Panel Metode <i>Fixed Effect</i> .....	99
Tabel 9 Regresi Data Panel Metode <i>Random Effec</i> .....	101
Tabel 10 Uji Chow .....	103
Tabel 11 Uji Housman .....	104



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Data Kemiskinan di Indonesia .....	7
Gambar 2 Kuadran CIBEST .....	21
Gambar 3 lima Faktor tegaknya urusan dunia dan masyarakat .....	30
Gambar 4 Kerangka Pemikiran .....	65
Gambar 5 Peta Wilayah Provinsi Sumatera Selatan .....	88



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa istilah dalam penelitian ini agar memudahkan dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dari skripsi ini. Oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut maka perlu adanya pembatasan arti kalimat dalam skripsi ini, dengan harapan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan terarah dari makna yang dimaksud. Adapun judul yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: **ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, PENGANGGURAN DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2013-2017**. Berikut uraian makna dari penelitian yang di maksud :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan atau perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>24</sup>
2. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang beda) yang ikut membentuk watak kepercayaan atau perbuatan seseorang.<sup>25</sup>
3. Indek Pembangunan Manusia adalah suatu konsep yang di perkenalkan pertama kali oleh UNDP (*United Nation Development Program*) pada

---

795 <sup>24</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.

<sup>25</sup>Pusat Bahasa, *Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 849.



tahun 1990, dimana konsep ini mencoba menggabungkan antara indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks daya beli.<sup>26</sup>

4. Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya.<sup>27</sup>
5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatu wilayah.<sup>28</sup>
6. Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan.<sup>29</sup>
7. Menurut Muhammad Abdul Mannan dalam “ *Islamic Economics :Theory and Practice*” menjelaskan bahwa Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah – masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai – nilai Islam.<sup>30</sup>

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat

---

<sup>26</sup>Irfan Syaumi Beik, Layli Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Edisi revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 147

<sup>4</sup>Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 472.

<sup>28</sup><https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/52>. *Diunduh tanggal 22 juli 2019, Pukul 22.50 WIB*

<sup>29</sup>*Ibid.*, h. 154

<sup>30</sup>Ika Yunia Fauzia, dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 6.

diartikan bahwa yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah penyelidikan variabel Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari sudut pandang Ekonomi Islam.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan penulis dalam memilih judul ini adalah:

### **1. Secara Objektif**

- a. Sumatera Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah yang seharusnya dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang bias memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Akan tetapi pada kenyataannya Provinsi Sumatera Selatan masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.
- b. Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan menduduki peringkat ketiga tertinggi sejak tahun 2013 - 2017 dibandingkan Provinsi lain se-Sumatera yaitu dengan rata-rata 14,90 persen dibawah Provinsi Aceh 18,34 persen dan provinsi Bengkulu 17,49 persen.
- c. Meskipun telah terjadi penurunan persentase kemiskinan selama tahun 2011 – 2015 akan tetapi angka penurunannya sangat kecil.

### **2. Secara Subjektif**

- a. Karena data dan sumber referensi terkait dengan judul penelitian telah tersedia di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.

- b. Kajian dalam judul penelitian ini sesuai dengan kajian keilmuan penulis, yaitu Ekonomi Islam konsentrasi Ekonomi Pembangunan.

### C. Latar Belakang

Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>31</sup> Pada tahun 1990 yang lalu, perhatian masyarakat terhadap masalah kemiskinan kembali digugah setelah cukup lama tidak banyak diperbincangkan di media masa.<sup>32</sup> Perhatian masyarakat tersebut berawal dari pernyataan Bank Dunia (1990) di media masa yang memuji keberhasilan Indonesia dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Menurut World Bank, Indonesia telah berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin secara relatif dari 40,08 % pada tahun 1976 menjadi 17,42 % ditahun 1987. Suatu penurunan yang cukup drastis selama kurun waktu 10 tahun.<sup>33</sup>

Kemiskinan dan ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan (kesenjangan ekonomi) merupakan dua masalah besar yang banyak terjadi di negara sedang berkembang (NSB), tidak terkecuali pada Indonesia.<sup>34</sup> Tingginya persentase penduduk miskin dalam suatu wilayah menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat dikarenakan pendapatan

---

<sup>31</sup>Prima Sukmaraga, *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per kapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang dipublikasikan tahun 2011.

<sup>32</sup>Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h.298.

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 78

<sup>34</sup>Tulus Tambunan, *Pembangunan Ekonomi Inklusif*, (Jakarta : LP3ES, 2016), h. 141.

perkapita mereka rendah. Keadaan ini diperparah lagi jika tingkat pengangguran dalam wilayah tersebut juga tinggi.<sup>35</sup>

Tahun 1990, melalui laporan Bank Dunia *World Development Report on Poverty* telah mendeklarasikan bahwa suatu peperangan yang berhasil melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga front, yaitu: (i) pertumbuhan ekonomi yang luas dan miskin; (ii) pengembangan SDM (pendidikan, kesehatan, dan gizi), yang memberi mereka kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi; dan (iii) membuat suatu jaringan pengaman sosial untuk mereka diantara penduduk miskin yang sama sekali tidak mampu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan kesempatan pengembangan SDM akibat ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam, konflik sosial, dan terisolasi secara fisik.<sup>36</sup> Untuk mendukung strategi yang tepat dalam memerangi kemiskinan, diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan perantarannya dapat dibagi menurut waktunya, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.<sup>37</sup>

Zaman yang serba global, peranan pemerintah untuk melakukan pembangunan ekonomi khususnya merupakan kunci menuju masyarakat yang

---

<sup>35</sup>Harlik,dkk, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Jambi”. *JurnalPerspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2013, ISSN: 2338-4603.

<sup>36</sup>Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 130.

<sup>37</sup>*Ibid*, h. 132.

lebih makmur.<sup>38</sup> Tujuan kebijakan ekonomi adalah menciptakan kemakmuran. Salah satu ukuran kemakmuran terpenting adalah pendapatan.<sup>39</sup> Kemakmuran tercipta karena ada kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Pendapatan regional adalah tingkat besarnya pendapatan masyarakat pada wilayah analisis. Tingkat pendapatan dapat diukur dari total pendapatan wilayah maupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut.

Menurut Mudrajat Kuncoro menyatakan penyebab kemiskinan adalah berasal dari teori Nurkse yaitu teori lingkaran kemiskinan (*Vicious circle of poverty*) dimana terdapat tiga penyebab utama yaitu: (i) Adanya keterbelakangan, dan ketertinggalan Sumber Daya Manusia (SDM), yang tercerminkan dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia; (ii) ketidaksempurnaan pasar, dan (iii) kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima (tercermin oleh rendahnya PDRB per kapita). Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercermin oleh tingginya angka pengangguran). Rendahnya akumulasi modal disebabkan oleh keterbelakangan, begitu seterusnya.<sup>40</sup>

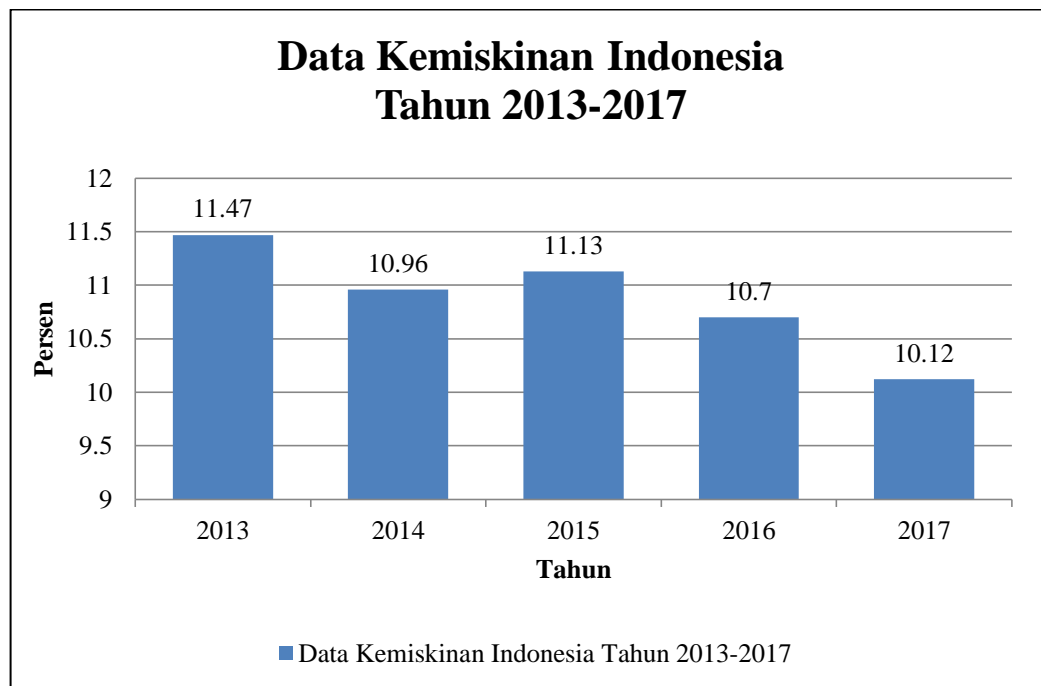
---

<sup>38</sup>Sanusi Bachrawi. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.74.

<sup>39</sup>Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 13.

<sup>40</sup>Prima Sukmagara *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per kapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang dipublikasikan tahun 2011..





**Gambar 1.1**  
**Data Kemiskinan Indonesia Tahun 2013-2017**

Tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode tahun 2013 sebesar 11,47 lalu mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 10,96, lalu mengalami kenaikan kembali pada tahun 2015 sebesar 11,13 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 10,7, 10,12.

Berikut adalah data kemiskinan di Provinsi Sumatera Tahun 2013-2017 di sajikan dalam tabel berikut <sup>41</sup>:

**Tabel 1.1**  
**Data Kemiskinan di Sumatera Tahun 2013-2017**

PROVINSI	2013	2014	2015	2016	2017
Bengkulu	17,63	17,11	17,43	16,79	15,54
Aceh	15,84	15,27	15,24	14,79	14,39

<sup>41</sup> BPS Sumatera Selatan dalam angka tahun 2018, hal.45

<b>Sumatera Selatan</b>	<b>13,89</b>	<b>13,47</b>	<b>13,49</b>	<b>13,25</b>	<b>12,95</b>
Lampung	13,25	13,07	12,15	12,69	11,84
Sumatera Utara	10,39	9,85	10,78	10,27	9,29
Jambi	8,97	9,03	9,96	9,01	8,59
Kepulauan Riau	7,5	8,07	7,39	7,73	7,94
Riau	8,11	7,73	8,5	7,44	7,27
Sumatera Barat	7,34	6,62	6,54	6,89	6,52
Bangka Belitung	5,22	4,94	4,8	5,12	5,46

Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan<sup>42</sup> yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berikut adalah data penduduk miskin di kabupaten Kota Sumatera Selatan tahun 2013-2017. Disajikan dalam tabel berikut<sup>43</sup> :

**Tabel 1.2**  
**Data penduduk miskin di Kabupaten Kota Sumatera Selatan**  
**tahun 2013-2017**

No	Kabupaten/ kota	Persentase penduduk miskin				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	OKU	12,31	11,96	13,22	13,29	12,95
2	OKI	15,82	15,30	17,08	16,03	15,75
3	Muara Enim	14,26	13,76	14,54	13,56	13,19
4	Lahat	18,61	18,02	18,02	17,11	16,81
5	Musi Rawas	17,85	17,28	15,13	14,30	14,24
6	Musi Banyuasin	18,02	17,38	18,35	17,27	16,75

<sup>42</sup>Whisnu Adhi Saputra, *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di kabupaten/Kota Jawa Tengah*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, dipublikasikan tahun 2011.

<sup>43</sup> BPS Sumatera Selatan dalam angka. Tahun 2018, hal.67

7	Banyuasin	12,28	11,88	12,45	11,72	11,47
8	OKU Selatan	11,57	11,21	11,58	10,95	10,98
9	OKU Timur	10,28	10,13	11,24	11,29	11
10	Ogan Ilir	13,86	13,38	14,43	13,80	13,58
11	Empat Lawang	13,10	12,89	13,33	12,54	12,54
12	Palembang	13,36	12,93	12,85	12,04	11,40
13	Prabumulih	11,23	10,86	12,12	11,44	11,42
14	Pagar Alam	9,00	8,90	9,64	9,19	8,89
15	Lubuk Linggau	14,38	13,90	15,16	13,99	13,12
16	Penukal Abab Lematang Ilir	12,67	13,44	14,88	14,23	14,53
17	Musi Rawas Utara	16,97	18,97	19,73	20	20
Sumatera Selatan		14,06	13,62	14,25	13,54	13,19

Faktor paling utama yang menyebabkan kemiskinan adalah kualitas sumber daya manusia yang tercermin pada indeks pembangunan manusia. Pembangunan Manusia (IPM) bermanfaat untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia baik antar negara maupun antardaerah. Indeks pembangunan manusia menjadi salah satu tolak ukur bagi suatu daerah untuk melihat seberapa tinggi tingkat pembangunan manusia tersebut.

Menurut pandangan *The United Nations Development Programme* (UNDP) merumuskan pembangunan manusia sebagai pilihan untuk manusia dalam meningkatkan kesempatan mereka dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan penghasilan serta pekerjaan.<sup>44</sup> Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.

---

<sup>44</sup> Aisyah Sisnita *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Lampung Periode 2009-2015*, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Naskah Publikasi Karya Ilmiah, 2017), h. 4.

Berikut ini di sajikan data Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2017. Disajikan dalam tabel berikut<sup>45</sup> :

**Tabel 1.3**  
**Persentase Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2017**

No	Kabupaten/ Kota	2013	2014	2015	2016	2017
1	Ogan Komering Ulu	65.51	66.21	67.18	67.47	68.28
2	Ogan Komering Ilir	63.52	63.87	64.73	65.44	66.11
3	Muara Enim	64.34	65.02	65.82	66.71	67.63
4	Lahat	64.15	64.52	65.25	65.75	66.38
5	Musi Rawas	62.23	63.19	64.11	64.75	65.31
6	Musi Banyuasin	64.18	64.93	65.76	66.45	66.96
7	Banyuasin	62.42	63.21	64.15	65.01	65.85
8	Ogan Komering Ulu Selatan	61.58	61.94	62.57	63.42	63.96
9	Ogan Komering Ulu Timur	66.09	66.74	67.17	67.38	67.84
10	Ogan Ilir	63.64	64.49	65.35	65.45	65.63
11	Empat Lawang	62.74	63.17	63.55	64	64.21
12	Pali	59.69	59.89	60.83	61.66	62.58
13	Musi Rawas Utara	60.56	61.34	62.32	63.05	63.18
14	Palembang	75.49	76.02	76.29	76.59	77.22
15	Prabumulih	71.87	72.20	73.19	73.38	73.58
16	Pagar Alam	64.14	64.75	65.37	65.96	66.81
17	Lubuk Linggau	72.55	72.84	73.17	73.57	73.67

Salah satu faktor yang menjadi penyebab jumlah penduduk miskin yaitu ditentukan dengan seberapa besar jumlah pengangguran yang ada di suatu wilayah tersebut. Pengangguran bisa disebabkan oleh bertambahnya angkatan kerja baru yang terjadi tiap tahunnya, sementara itu penyerapan tenaga kerja tidak bertambah. Dan masalah pengangguran bertambah serius yang disebabkan perkembangan penduduk yang kian bertambah cepat

---

<sup>45</sup> BPS Sumatera Selatan dalam angka. Tahun 2018, hal.74

dan jumlah yang sangat besar.<sup>46</sup> Selain itu adanya industri yang bangkrut sehingga harus memberhentikan tenaga kerjanya. Hal ini berarti, semakin tinggi jumlah pengangguran maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Pengangguran yaitu pertambahan tenaga kerja yang tidak dapat diimbangi oleh pertambahan kesempatan kerja yang diciptakan oleh kegiatan- kegiatan ekonomi yang baru.<sup>47</sup> Dalam ilmu kependudukan (*demografi*), orang yang mencari kerja masuk dalam penduduk disebut angkatan kerja. Dapat dikatakan angkatan kerja adalah seseorang yang berusia 15-64 tahun yang dalam bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Jadi apabila orang yang dalam angkatan kerja tidak bekerja maka disebut pengangguran.<sup>48</sup>

Dalam pengangguran terdapat pengangguran terbuka (*open unemployment*) yakni tenaga kerja yang menganggur penuh, selain menghadapi pengangguran terbuka, tenaga kerja yang berada di kota-kota menghadapi pula masalah pengangguran terselubung (*underemployment*) yakni penggunaan tenaga kerja yang lebih rendah dari jam kerjanya yang normal. Dalam pengangguran terbuka jenis ini banyak ditemukan di kota yang sedang berkembang. Berikut ini disajikan data jumlah tingkat pengangguran terbuka pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2017<sup>49</sup>:

---

<sup>46</sup>Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 86, cet. Ke-8.

<sup>47</sup> *Ibid*, h.89

<sup>48</sup>Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam, 2008), hal. 376, edisi 3.

<sup>49</sup> BPS Sumatera Selatan Dalam Angka tahun 2018. Hal.64



**Tabel 1.4**  
**Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka**  
**Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan**  
**Tahun 2013- 2017 (Persen)**

No	Kabupaten/ Kota	2013	2014	2015	2016	2017
1	Ogan Komering Ulu	3,97	4,40	7,64	6,51	4,50
2	Ogan Komeing Ilir	4,58	3,48	6,89	4,50	3,45
3	Muara Inim	4,23	5,61	6,69	4,74	3,31
4	Lahat	3,76	5,62	4,26	4,40	4,33
5	Musi Rawas	0,92	1,67	2,04	2,25	2,80
6	Musi Banyuasin	3,19	3,74	5,61	3,48	2,75
7	Banyuasin	4,49	2,97	5,56	3,24	3,65
8	Oku Selatan	2,33	1,92	1,83	2,20	3,54
9	Oku Timur	4,09	4,32	4,74	3,67	2,35
10	Ogan Ilir	3,47	3,03	5,43	4,05	3,20
11	Empat Lawang	4,53	5,87	5,21	3,98	3,85
12	Palembang	9,15	9,32	9,52	9,28	8,20
13	Prabumulih	5,36	6,90	6,26	6,59	6,73
14	Pagar Alam	7,04	4,81	3,53	3,89	2,57
15	Lubuk Linggau	7,17	6,80	12,31	8,89	4,00
16	PALI	59,69	59,89	0,94	3,40	4,43
17	Musi Rawas Utara	3,78	2,09	2,99	4,90	6,11

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya.

**Rata-rata jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kota  
Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2017**

No	Kabupaten/ kota	Persentase penduduk miskin				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	OKU	12,31	11,96	13,22	13,29	12,95
2	OKI	15,82	15,30	17,08	16,03	15,75
3	Muara Enim	14,26	13,76	14,54	13,56	13,19
4	Lahat	18,61	18,02	18,02	17,11	16,81
5	Musi Rawas	17,85	17,28	15,13	14,30	14,24
6	Musi Banyuasin	18,02	17,38	18,35	17,27	16,75
7	Banyuasin	12,28	11,88	12,45	11,72	11,47
8	OKU Selatan	11,57	11,21	11,58	10,95	10,98
9	OKU Timur	10,28	10,13	11,24	11,29	11
10	Ogan Ilir	13,86	13,38	14,43	13,80	13,58
11	Empat Lawang	13,10	12,89	13,33	12,54	12,54
12	Palembang	13,36	12,93	12,85	12,04	11,40
13	Prabumulih	11,23	10,86	12,12	11,44	11,42
14	Pagar Alam	9,00	8,90	9,64	9,19	8,89
15	Lubuk Linggau	14,38	13,90	15,16	13,99	13,12
16	Penukal Abab Lematang Ilir	12,67	13,44	14,88	14,23	14,53
17	Musi Rawas Utara	16,97	18,97	19,73	20	20
Sumatera Selatan		14,06	13,62	14,25	13,54	13,19

Sumber : *Bps Sumatera Selatan*

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengukur seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengangguran (PG), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2017.

#### **D. Rumusan Masalah**

Pembahasan dalam penelitian ini mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, dan Produk Domestik Regional Bruto dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan dan

ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam. Secara khusus dalam penelitian ini akan mengulas secara jelas mengenai hal sebagai berikut :

1. Apakah IPM, pengangguran dan PDRB secara parsial berpengaruh terhadap kemiskinan di kabupaten kota provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah IPM, pengangguran dan PDRB secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan di kabupaten kota provinsi Sumatera Selatan?
3. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam tentang kemiskinan di kabupaten kota provinsi Sumatera Selatan?

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pengaruh tiga variabel yaitu variabel IPM, Pengangguran dan PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial.
- b. Untuk mengetahui pengaruh tiga variabel yaitu variabel IPM, Pengangguran dan PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan secara simultan.
- c. Untuk mengetahui pengaruh IPM, pengangguran, dan PDRB terhadap kemiskinan dalam perspektif Ekonomi Islam.

##### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan ekonomi khususnya ekonomi pembangunan yang

ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan adalah untuk melengkapi kajian mengenai kemiskinan dengan sudut pandang Islam.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna berkaitan dengan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Selatan sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pilihan strategi pengambilan kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan dan perencanaan pembangunan.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Kemiskinan

#### 1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan menurut Shirazi (1994) dan Pramanik (1998) adalah suatu situasi yang dihadapi oleh seorang individu dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual.<sup>50</sup>

Menurut Mudrajat Kuncoro menerangkan bahwa penyebab kemiskinan adalah berasal dari teori Nurkse yaitu teori lingkaran kemiskinan (*Vicious circke of poverty*) dimana terdapat tiga penyebab utama yaitu: (i) Adanya keterbelakangan, dan ketertinggalan Sumber Daya Manusia (SDM), yang tercerminkan dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia; (ii) ketidaksempurnaan pasar, dan (iii) kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima (tercermin oleh rendahnya PDRB per kapita). Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercermin oleh tingginya angka pengangguran). Rendahnya akumulasi modal

---

<sup>50</sup> Irfan Syauqi dkk. *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 68.



disebabkan oleh keterbelakangan, begitu seterusnya.<sup>51</sup>

## 2. Indikator Kemiskinan

Foster dkk (1984) memperkenalkan tiga indikator untuk mengukur kemiskinan.<sup>52</sup> yaitu:

- a. *The incidence of poverty* yaitu presentase dari populasi yang hidup didalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita dibawah garis kemiskinan.
- b. *The depth of poverty* yang menggambarkan dalamnya kemiskinan disuatu wilayah yang diukur dengan Indeks Jarak Kemiskinan (IJK), atau dikenal dengan sebutan *Poverty Gap Index*. Indeks ini mengestimasi jarak/perbedaan rata-rata pendapatan orang miskin dan garis kemiskinan sebagai suatu proporsi dari garis tersebut.
- c. *The severity of poverty* yang diukur dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (IKK). Indeks ini pada prinsipnya sama dengan IJK. Namun, selain mengukur jarak yang memisahkan orang miskin dari garis kemiskinan, IKK juga mengukur ketimpangan diantara penduduk miskin atau penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks ini juga disebut dengan *distributionally sensitive index* digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup>Prima Sukmagara, *Perencanaan Pembangunan, Dasar-dasar Kebijakan Ekonomi*. Jakarta :Aksara Baru, 1986

<sup>52</sup>Tulus Tambunan, *Metode Penulisan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke-15, Bandung:Alfabeta

<sup>53</sup>*Ibid*, h.97

### 3. Macam-macam kemiskinan

#### a. Kemiskinan Absolut

Yaitu dengan pendekatan ini diidentifikasi banyaknya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan tertentu, dimana diperhitungkan berdasarkan standar hidup minimal suatu negara, standar minimal antar negara berbeda dengan negara lain.<sup>54</sup>

#### b. Kemiskinan Relatif

Yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan.<sup>55</sup> Dengan kata lain, kemiskinan relatif berkaitan dengan permasalahan distribusi pendapatan.<sup>34</sup> Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan jika tingkat hidup masyarakatnya berubah.<sup>56</sup>

#### c. Kemiskinan Struktual

Kemiskinan struktural adalah ketidakberdayaan sekelompok masyarakat dibawah suatu sistem pemerintahan yang menyebabkan mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplotasi.<sup>57</sup>

### 4. Penyebab kemiskinan

Terdapat tiga macam pendekatan yang menjelaskan mengenai sebab – sebab kemiskinan, yaitu:

#### a. *System approach*

Yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada adanya

---

<sup>54</sup>Nur Rianto al Arif, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori dan Analisis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.227

<sup>55</sup>*Ibid*, h.178

<sup>56</sup>Lincoln Arsyad, . *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016

<sup>57</sup>Nur Rianto al-Arif, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014

keterbatasan pada aspek-aspek geografi, ekologi, teknologi, dan demografi.<sup>58</sup> Kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor tersebut dianggap lebih banyak menekan warga masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan atau pedalaman.

*b. Decision-making model*

Pendekatan ini menekankan pada kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan keahlian sebagian warga masyarakat dalam merespon sumber- sumber daya ekonomi, baik yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar.<sup>59</sup> Dengan kata lain kemiskinan ini disebabkan karena kurangnya inovasi masyarakat untuk melakukan wirausaha, sehingga masyarakat hanya mengandalkan lapangan pekerjaan yang disediakan oleh orang lain dan pemerintah tanpa ada upaya untuk menciptakan lapangan kerja sendiri.

*c. Structural approach*

Pendekatan ini melihat bahwa kemiskinan itu terjadi karena ada ketimpangan dalam kepemilikan atas faktor produksi, seperti tanah, teknologi, produktivitas, dan bentuk kapital lainnya.<sup>60</sup> Hal ini tercermin dengan adanya sekelompok kecil dari masyarakat yang justru menguasai modal dan perekonomian masyarakat secara lebih dominan, seperti para pengusaha raksasa, dan sebagainya.

---

<sup>58</sup> *Ibid*, h.234

<sup>59</sup> Nur Rianto, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015

<sup>60</sup> *Ibid*; h.250

## B. Kemiskinan Dalam Perspektif Islam

### 1. Pengertian Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Kemiskinan menurut Shirazi adalah suatu keadaan yang dihadapi oleh seorang individu dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual.<sup>61</sup>

Menurut Al-Ghozali kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi apa yang ia butuhkan secara mendasar. Ketidakmampuan selain kebutuhan dasar bukan termasuk kemiskinan.<sup>62</sup>

Kemiskinan dalam perspektif Islam dikategorikan kedalam dua golongan yaitu fakir dan miskin. Fakir adalah keadaan seseorang dimana ia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya, ia tidak mampu melakukan usaha apapun seperti orang cacat dan orang lanjut usia. Sedangkan miskin adalah suatu kondisi seseorang yang memiliki kemampuan untuk mencari nafkah akan tetapi pendapatannya masih tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan dasarnya.<sup>63</sup>

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks yang sangat tidak dianjurkan oleh Islam. Islam melarang kepada umatnya untuk meninggalkan keluarganya dalam keadaan lemah dan miskin sesuai dengan firman Allah dan QS. An Nisa' sebagai berikut :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا

---

<sup>61</sup> Ibid. h.68.

<sup>62</sup> Nurul Huda *Ekonomi Pembangunan Islam* (Prenada Media Grup, Jakarta : 2015 ). Hal.23

<sup>63</sup> An Nisaa' Siti Humanira. *Kredit Berbasis Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus: Grameen Bank, Bangladesh)*. Jurnal *The Moslem Planners* #1. April – Mei : 2013.

## اللَّهُ وَلَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” (QS. An Nisa’ : 9)<sup>64</sup>

Kemiskinan merupakan sebuah konsep multidimensi yang sulit untuk didefinisikan secara tunggal. Banyak pakar dalam berbagai disiplin ilmu untuk mendefinisikannya.<sup>65</sup>

Kemiskinan dalam perspektif Islam sesungguhnya memiliki sedikit pemahaman yang berbeda dengan kemiskinan secara konvensional. Islam mendefinisikan kemiskinan kedalam dua kategori yaitu fakir dan miskin.<sup>66</sup>

Definisi fakir menurut mazhab Syafii dan Hambali yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan sekali karena ada sebab khusus yang syar’i (*uzur syar’i*), seperti usia tua, serta sibuk dalam dakwah sehingga tidak sempat untuk mencari nafkah.<sup>67</sup> Seperti yang tercantum pada QS. Al Baqarah (273):

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢٧٣

Artinya: “(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir

<sup>64</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, Syamil Alquran dan terjemah perkata. PT. Sygma Examedia Arkanleema :Bandung, h.78.

<sup>65</sup>Irfan Syauqi, . *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004

<sup>66</sup>An Nisaa’ Siti Humanira, *Kredit Berbasis Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus : Grameen Bank, Bangladesh)*. Jurnal The Moslem Planners #1, April-Mei : 2013.

<sup>67</sup>Irfan Syauqi, . *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004



*yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah; sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi; orang lain yang tidak tahu, menyangka mereka orang kaya karena mereka memelihara diri (dari minta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.” (QS. Al Baqarah : 273)<sup>68</sup>*

Sedangkan pengertian orang miskin menurut mazhab Syafii dan Hambali adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya meskipun ia memiliki pekerjaan dan penghasilan.<sup>69</sup> Hal ini didasarkan pada QS. Al Kahfi ayat 79 sebagai berikut:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا  
وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ٧٩

Artinya“Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut, aku bermaksud merusaknya, karena dihadapan mereka ada seorang raja yang merampas setiap perahu.” (QS. Al Kahfi : 79)<sup>70</sup>

Menurut Al Ghazali kemiskinan adalah ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketidakmampuan memnuhi apa yang tidak dibutuhkan bukan merupakan kemiskinan.<sup>71</sup> Al Ghazali membagi kemiskinan menjadi dua bagian yaitu kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan material dan kemiskinan yang berkaitan dengan kebutuhan rohani atau spiritual. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan bukan hanya merupakan perampasan barang dan jasa, akan tetapi juga

<sup>68</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Loc Cit.* h.46

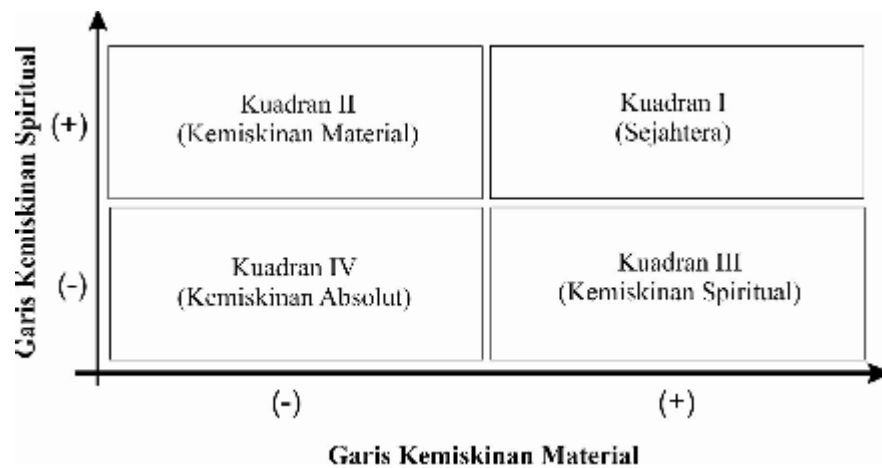
<sup>69</sup>Irfan Syauqi, . *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004

<sup>70</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-Quran dan terjemah*.....h.302

<sup>71</sup>Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group,2015), h. 23.

kurangnya kemiskinan dalam roh. Rehman juga berpendapat bahwa umat Islam dapat meningkatkan kehidupan rohani mereka dengan meningkatkan kehidupan material mereka. Selanjutnya, Chapra berpendapat bahwa Islam menjadi agama keseimbangan, telah memberikan penekanan yang sama pada kedua spiritual dan duniawi.<sup>72</sup>

Definisi kemiskinan materiil, spiritual dan kemiskinan absolut diatas, maka telah dibentuk kuadran CIBEST.<sup>73</sup> Kuadran CIBEST terbagi menjadi empat bagian yaitu seperti pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.1 Kuadran CIBES

Kuadran CIBEST membagi kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual kedalam dua tanda yaitu positif (+) dan negatif (-). Tanda (+) artinya rumah tangga tersebut mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik, sementara tanda (-) berarti rumah

<sup>72</sup> Ibid

<sup>73</sup> Penamaan kuadran CIBEST (*Center of Islamic Business and Economics Studies*) ini karena kuadran ini dibentuk berdasarkan hasil penelitian Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah IPB pada tahun 2013 tentang konsep *Islamic Poverty Line*. Penelitian ini diketuai oleh Irfan Syauqi Beik dengan anggota peneliti Laily Dwi Arsyianti dan Muhammad Findi Alexandi, serta dibantu oleh asisten peneliti Busaid dan Ach Firman Wahyudi. Dalam buku *Ekonomi Pembangunan Syariah* edisi Revisi :2016

tangga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik.<sup>74</sup> Dari tanda tersebut akan diperoleh empat kemungkinan yaitu tanda (+) pada pemenuhan pada kedua kebutuhan material dan spiritual, tanda (+) pada salah satu kebutuhan saja apakah pada kebutuhan material atau spiritual saja, serta tanda (-) pada kedua kebutuhan material dan spiritual.<sup>75</sup>

Empat kemungkinan inilah yang kemudian melahirkan empat kuadran. Pada kuadran pertama, rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan materiil dan spiritual sehingga tanda keduanya adalah (+). Inilah kuadran kesejahteraan secara ekonomi produktif dan secara ibadah juga produktif.

Kemungkinan kedua adalah rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan spiritual (+) akan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan materiilnya (-) dengan baik. Rumah tangga yang direfleksikan oleh kuadran II ini adalah rumah tangga yang berada pada kategori kemiskinan materiil. Sebaliknya pada posisi kuadran III, rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan materiil (+) tapi tidak mampu memenuhi kebutuhan spiritual (-). Maka kondisi rumah tangga demikian adalah miskin secara spiritual.<sup>76</sup>

Kondisi terburuk terletak pada kuadran IV dimana kondisi rumah tangga yang tidak mampu memenuhi keduanya baik materiil maupun

---

<sup>74</sup>Irfan Syauqi, *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016

<sup>75</sup> Irfan Syauqi, *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016

<sup>76</sup> *Ibid*, h.88

spiritual (-). Manfaat dari kuadran CIBEST ini adalah terkait dengan pemetaan kondisi keluarga atau rumah tangga, sehingga dapat diusulkan program pembangunan yang tepat.<sup>77</sup>

## 2. Penyebab Kemiskinan dalam Persepektif Islam

Dalam perspektif Islam, kemiskinan timbul karena berbagai sebab structural<sup>78</sup> yaitu :

- a. Kemiskinan timbul akibat kejahatan manusia terhadap alam yang tidak mampu mengelolanya dengan baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al Mulk ayat 21 sebagai berikut :

أَمْنَ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رَزْقَهُ بَلْ لَّجُوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ٢١  
Artinya “atau siapakah Dia yang memberi kamu rezki jika Allah menahan rezki- Nya? sebenarnya mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri? (QS. Al Mulk : 21)<sup>79</sup>

- b. Kemiskinan yang timbul karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya terhadap kelompok yang lain (miskin) sebagaimana diterangkan dalam QS. Al Imron ayat 180 sebagai berikut :

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ  
بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٨٠

Artinya “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu

<sup>77</sup> Ibid, h.78

<sup>78</sup> Retno Wuri, *Kemiskinan: Bagaimana Islam Memandangnya*. Jurnal The Moslem Planners #1, Keluarga Mahasiswa Muslim Planologi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung. April – Mei 2013, hlm. 4

<sup>79</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-Quran dan terjemah*. . . . . h. 563

akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat, dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS : Al Imron : 180).<sup>80</sup>

Islam menegaskan bahwa kemiskinan tidak boleh terjadi karena faktor malas.<sup>83</sup> Justru Islam mengajarkan kepada kaum miskin untuk bersedekah meskipun dengan jumlah yang sangat sedikit. Seperti yang tercantum pada QS. Al Imron ayat 134 sebagai berikut :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٣٤

Artinya:“ (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Al Imron : 134).<sup>81</sup>

### 3. Bahaya Kemiskinan Dalam perspektif Islam

Islam tidak membenarkan kaum sufi yang telah menerima konsep *macheisme* dari Persia, India atau paham *Rahbaniyah* kaum Masehi karena tidak satupun ayat Alquran dan hadits yang memuja kemiskinan.<sup>82</sup> Hadits-hadits yang memuji *zuhud* bukan berarti setuju terhadap kemiskinan. Menurut Islam kekayaan adalah suatu nikmat dan karunia dari Allah SWT yang harus disyukuri oleh umat manusia, sebaliknya, kemiskinan sebagai masalah bahkan musibah yang harus dihilangkan.

Dalam Alquran QS. Ad Dhuha ayat 8 dijelaskan bahwa Allah

<sup>80</sup> *Ibid*, h.73

<sup>81</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, AL-Quran dan terjemah..... h.67

<sup>82</sup> Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. (Jakarta : Gema Insani Pers, 1995), h. 22.

SWT memuliakan Rasul-Nya dengan kecukupan materi, yakni sebagai berikut:

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝٨

Artinya: “Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.” (Qs. adh-Dhuha : 8)<sup>83</sup>

Kelompok masyarakat miskin yang berada pada tingkat paling rendah sering dianggap sebagai penyakit masyarakat yang paling buruk. Pada lingkungan masyarakat miskin, semua ideologi yang ekstrim banyak diminati dan semua perbuatan keji sering dihalalkan demi memenuhi keinginannya. Hal ini pernah terjadi pada masa jahiliyah. Saat itu, orang-orang tega membunuh anak-anak mereka karena perasaan takut terhina oleh kemiskinan sebagaimana mereka melihat sebagian pengaruh kemiskinan yang membahayakan kehidupan seseorang.<sup>84</sup> Memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan hal-hal dibawah ini, yaitu:

a. Kemiskinan Membahayakan Akidah

Kemiskinan dapat membahayakan akidah terutama pada masyarakat miskin yang tinggal dilingkungan orang kaya yang aniaya. Dalam keadaan ini kemiskinan dapat menebarkan benih-nenih keraguan terhadap kebijaksanaan Allah mengenai pembagian rezeki.<sup>85</sup> Akibat dari kemiskinan dan ketimpangan sosial, dapat menimbulkan penyimpangan akidah. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa

<sup>83</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, AL-Quran dan terjemah.....h.596

<sup>84</sup>Bayu Tri Cahya, *Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Alquran dan Hadis*. Jurnal Penelitian,, Vol.9, No.1, Februari 2015. H.43

<sup>85</sup>Yusuf Qardhawi, AL-Quran dan terjemah.....h.24

Rasulullah bersabda :

Artinya: *“Kemiskinan dapat mengakibatkan kekufuran”*<sup>86</sup>

Dalam hadits lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda :

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami waki’, telah menceritakan padaku Utsman Asy Syakham dari Muslimbin Abu Bakhrah dari Ayahnya bahwa Nabi SAW biasa berdoa “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Mu dari kekufuran, kefakiran, dan azab kubur.”*<sup>87</sup>

#### b. Kemiskinan Membahayakan Akhlak dan Moral

Selain membahayakan akidah, kemiskinan juga dapat membahayakan akhlak dan moral, apalagi bagi kaum *duaafa* yang tinggal dilingkungan orang kaya yang tamak akan mendorong orang miskin untuk melakukan kejahatan dan melanggar hukum.<sup>88</sup> Nabi SAW pernah menjelaskan hubungan kemiskinan dan kecukupan yang berkaitan dengan kebaikan dan kekejian seseorang. Beliau menuturkan :

*Rasulullah SAW berdo’a dalam sholat : “Apabila seseorang merugi dan berhutang , ia akan berbincang bohong dan berjanji kosong”.*<sup>89</sup>

#### c. Kemiskinan Mengancam Kestabilan Pemikiran

Kemiskinan tidak hanya berdampak pada sisi rohani dan akhlak saja, akan tetapi kemiskinan juga dapat mempengaruhi pikiran seseorang. Apabila seseorang atau keluarga dalam keadaan

---

<sup>86</sup> Hadis ini dikeluarkan oleh Imam al Baihaqi dalam kitab *“Syu’abul Iman”* (no. 6612). [http://Muslim.or.id/18982-hadits lemah](http://Muslim.or.id/18982-hadits%20lemah). Diakses pada Kamis, 11 Mei 2017. Jam 12:49

<sup>87</sup> HR Ahmad. *Hadits Abu Bakrah Nafi’ bin Al Hants bin Kaladah Ra*. Kitab :Musnad Penduduk Bashrah, no 1948

<sup>88</sup> *Ibid. h.67*

<sup>89</sup> HR. Bukhori Muslim 2222. *Mencari pinjaman dan melunasi hutang*. No.2397

miskin sedangkan mereka ingin hidup yang serba mewah maka pikiran-pikiran buruk pasti terlintas dalam pikiran mereka untuk memperoleh kemewahan tersebut.<sup>90</sup>

#### d. Kemiskinan Membahayakan Keluarga

Kemiskinan dapat mengancam keluarga, baik dalam segi pembentukan, kelangsungan, maupun keharmonisannya. Dari sisi pembentukan keluarga, kemiskinan menjadi rintangan besar bagi seorang pemuda untuk melangsungkan perkawinan, disamping dipenuhinya berbagai syarat seperti mahar, nafkah dan kecukupan ekonomi. Oleh karena itu Alquran menasehati bagi mereka yang mengalami kesulitan untuk menjaga diri dan bersabar sampai berkecukupan secara ekonomi.<sup>91</sup> Sebagaimana terdapat dalam potongan QS. An Nuur :33.

وَلَيْسَتَعْظِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ  
فَضْلِهِ.....

Artinya : “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya...” (Qs. an-Nur :33)<sup>92</sup>

Karena faktor kemiskinan ekonomi juga sering menyebabkan timbulnya pertengkaran rumah tangga bahkan perceraian. Menurut hukum Islam, hakim boleh menjatuhkan talak pada seorang istri yang suaminya tidak mampu memberikan nafkah. Jelaslah, bahwa

<sup>90</sup>Yusuf Qardhawi, AL-Quran dan terjemah.....h.25

<sup>91</sup>Ibid, h.26

<sup>92</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, AL-Quran dan terjemah.....h.354



Islam mengakui adanya dampak ekonomi terhadap perilaku manusia.<sup>93</sup>

e. Kemiskinan Mengancam Masyarakat dan Kestabilanya

Selanjutnya, kemiskinan juga membahayakan keamanan dan kestabilan sosial. Seseorang masih bisa bertoleransi jika kemiskinan yang menimpanya disebabkan karena kurangnya penghasilan, akan tetapi lain halnya jika kemiskinan disebabkan karena adanya kesenjangan atau ketidak-merataan distribusi pendapatan, keserakahan golongan kaya, dan sikap berfoya-foya sekelompok kecil masyarakat diatas penderitaan orang banyak.<sup>94</sup> Kemiskinan semacam ini dapat memutuskan hubungan kasih sayang antar sesama masyarakat dan dapat menimbulkan perpecahan ditengah masyarakat.

Kemiskinan juga berbahaya terhadap kedaulatan, kebebasan, dan kemerdekaan suatu bangsa. Karena negara yang miskin pasti bergantung pada negara asing, dan suatu negara miskin tidak akan bisa mensejahterakan masyarakat. Begitupun juga masyarakat tidak dapat mensejahterakan dirinya sendiri atau membela tanah airnya.

#### 4. Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Islam

Dalam perspektif syariah, kemiskinan terjadi akibat perbedaan

---

<sup>93</sup>Yusuf Qardhawi, AL-Quran dan terjemah.....h.27

<sup>94</sup>*Ibid*, h.29

pendapatan sesungguhnya merupakan *sunnatullah fil hayah*.<sup>95</sup> Keberadaan kelompok masyarakat yang berbeda-beda penghasilan tidak bisa dinafikan oleh karena itu Islam tidak pernah berbicara untuk bagaimana menghilangkan kemiskinan, akan tetapi bagaimana caranya untuk mereduksi dan meminimalisir kemiskinan ini agar kehidupan yang lebih sejahtera dapat diraih. Caranya adalah sikap saling menolong, saling membantu, saling bersilaturahmi, saling mengisi dan saling bersinergi.<sup>96</sup>

Ketika berbicara mengenai kemiskinan, maka yang ditekankan adalah upaya perhatian, pembelaan dan perlindungan terhadap kelompok miskin yang dilakukan oleh mereka yang terkategori sebagai kelompok mampu. Pihak yang dianggap mampu ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik secara individu maupun kelembagaan, sehingga tingkat kemiskinan masyarakat dapat diminimalisir. Apabila kelompok mampu ini tidak mempedulikan nasib kaum miskin, maka mereka disebut sebagai pendusta agama.<sup>97</sup> Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Al Ma'un : 1-3.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۖ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۚ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۚ

---

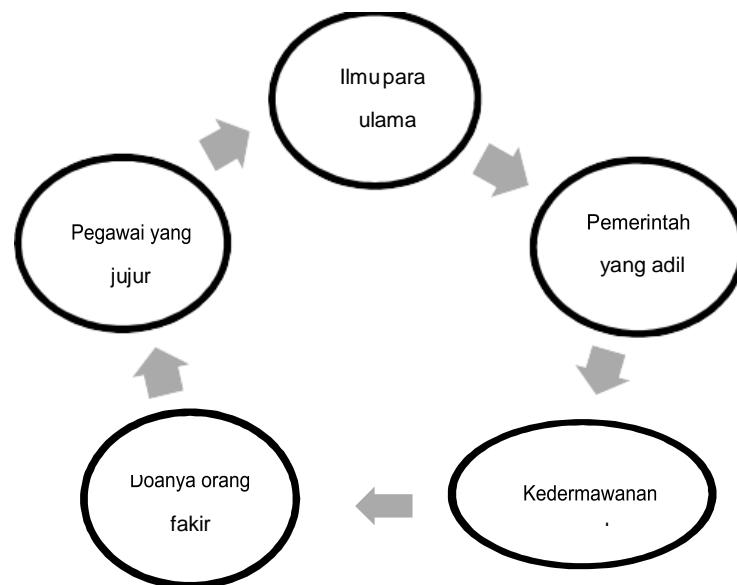
<sup>95</sup>Yusuf Qardhawi. AL-Quran dan terjemah.....h.70

<sup>96</sup> Ibid,h.87

<sup>97</sup> Ibid,h.90

*Artinya : “(1) Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, (2) Itulah orang yang menghardik anak yatim, (3) dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin.” (QS. Al Ma’un : 1-3)<sup>98</sup>*

Ali bin Abi Thalib menjelaskan terdapat lima pilar penting yang dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat menurut Islam antara lain: (1) ilmu para ulama, (2) pemerintah yang adil, (3) kedermawanan kelompok orang-orang kaya, (4) doanya orang-orang fakir, dan (5) kejujuran para pegawai. Dengan demikian Ali bin Abi Thalib menjadikan orang kafir miskin memiliki akhlak yang baik (dicirikan dengan suka berdoa) sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu masyarakat.<sup>99</sup>



**Gambar 2.2**

**Lima Faktor Tegaknya Urusan Dunia dan Masyarakat**

<sup>98</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, AL-Quran dan terjemah.....h.602

<sup>99</sup>Irfan Syauqi, *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Berikut adalah beberapa prinsip – prinsip terkait kebijakan publik yang dapat dijadikan panduan bagi program pengentasan kemiskinan dan sekaligus penciptaan lapangan pekerjaan,<sup>100</sup> yaitu :

1. Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor growth*). Islam mencapai *pro-poor growth* melalui dua cara yaitu pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor riil.
2. Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak kepada kepentingan masyarakat banyak (*pro-poor budgeting*). Dalam sejarah Islam terdapat tiga prinsip utama dalam mencapai *pro-poor budgeting*, yaitu kebijakan fiskal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penggunaan anggaran negara sepenuhnya untuk kepentingan publik atau efisiensi anggaran.
3. Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor infrastructure*) sehingga memiliki dampak eksternalitas positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian.
4. Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas (*pro-poor public services*). Terdapat tiga bidang pelayanan publik yang harus mendapat perhatian serius yaitu: birokrasi, pendidikan dan kesehatan.
5. Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan

---

<sup>100</sup>Retno Wuri, . *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004

yang memihak masyarakat miskin (*pro-poor income distribution*).<sup>101</sup> Terdapat empat instrumen utama dalam Islam terkait distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam yaitu :

#### 1) Zakat

Dalam Islam Allah memposisikan zakat sebagai poros utama bersama dengan shalat. Tanpa membayarkan zakat seseorang tidak dapat dianggap masuk dalam kelompok orang yang beriman dan telah dijanjikan oleh Allah kemenangan, surga firdaus, serta kabar gembira bagi orang-orang yang membayarkan zakat.<sup>102</sup> Sebagaimana firman Allah dalam QS.

Al-Mukminun ayat 1-4 yaitu:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ ١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشِعُونَ ۝ ٢  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ ٣ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ ٤

*Artinya: "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman (1), yaitu orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya (2), dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna (3), dan orang-orang yang menunaikan zakat (4)".*<sup>103</sup>

Begitu besar janji Allah bagi orang yang membayar zakat oleh karena itu zakat menjadi satu kunci untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini karena kewajiban membayar zakat merupakan

<sup>101</sup> Retno Wuri, . *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004

<sup>102</sup> Yusuf Qardhawi. *AL-Quran dan terjemah*..... h.93.

<sup>103</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *AL-Quran dan terjemah*..... h.313

poros utama dalam sistem keuangan Islam (fiskal), dan sesuai dengan prinsip distribusi kekayaan dalam Islam.<sup>104</sup>

Zakat memiliki aturan yang sangat jelas dan adil, dengan mewajibkan membayarkan 2,5 persen dari hartanya setiap tahun zakat mampu mendorong masyarakat untuk memberdayakan hartanya. Dengan demikian akan terjadi peningkatan ekonomi. Selain itu zakat memiliki pengaruh yang cukup signifikan diberbagai sektor ekonomi, seperti daya produksi meningkat, mengurangi pengangguran, dan mengurangi kesenjangan pendapatan dengan catatan zakat yang disalurkan tidak hanya untuk konsumtif.<sup>105</sup> Zakat juga dibedakan menjadi dua macam yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif.<sup>106</sup> Dengan pendayagunaan zakat produktif, tepat sasaran dan berkelanjutan, zakat akan mampu mengubah kaum dhuafa (*mustahik*) menjadi (*muzzaki*) dikemudian hari.

Menurut Ibn Hazm zakat merupakan suatu kewajiban dan juga sebagai peranan harta dalam mengentaskan kemiskinan. Peran pemerintah sebagai pengumpul zakat dapat memberi sanksi kepada masyarakat yang enggan mengeluarkan zakatnya.<sup>107</sup> kewajiban

---

<sup>104</sup>Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. (Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2013). h.98

<sup>105</sup>Nurul Huda. *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 23.h. 138.

<sup>106</sup>Nur Rianto AL Arif, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori dan Analisis*, Bandung: Alfabeta, 2010h.247.

<sup>107</sup>Euis Amalia. , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006h.194

membayar zakat ini tidak akan hilang sampai ia mengeluarkannya dan pembayaran zakat tidak dibatasi oleh waktu.

## 2) Infak

Infak atau sedekah merupakan pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah yang tertentu yang dilakukan dengan mengharap ridho dari Allah SWT.<sup>108</sup> Infak dan sedekah dapat berupa material (uang, barang) dan juga dapat berupa non material (keahlian). Infak yang berupa keahlian dapat diberikan menurut profesinya seperti kepada lembaga pendidikan SD / SMP /SMA /Perguruan Tinggi bagi mereka yang berprofesi sebagai guru.

Rekonstruksi infak dan sedekah profesi tersebut secara langsung dapat meningkatkan kemanfaatan lebih besar dari sekedar infak materil berupa uang atau barang yang biasa dilakukan, sebab dapat mewujudkan kualitas manusia yang lebih baik melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, hukum maupun yang lainnya secara gratis dan berkelanjutan.<sup>109</sup>

## 3) Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *waqf* yang merupakan bentuk masdar dari kata *waqafa* yang berarti

---

<sup>108</sup> *Ibid*, h.56

<sup>109</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 26.

berhenti.<sup>110</sup> Wakaf merupakan suatu jenis pemberian (barang atau kepemilikan) untuk dimanfaatkan untuk kepentingan umum.<sup>111</sup> Cara menanggulangi kemiskinan tidak hanya dengan zakat namun juga bisa berupa wakaf yaitu dengan pengembangan kelembagaan (*institutional building*), akses, kesejahteraan (*welfare*), penyadaran (*conszientization*), dan partisipasi politik (*political participation*).

Pemanfaatan harta wakaf untuk kepentingan masyarakat dapat dilihat dari keberadaan harta wakaf yang digunakan untuk pendidikan, ekonomi, dan kegiatan sosial. Secara ekonomi, harta wakaf dapat juga untuk meningkatkan keterampilan masyarakat miskin, seperti dengan mendirikan lembaga pendidikan dan pelatihan, rumah sakit, lembaga keuangan mikro, bank wakaf dan lain sebagainya dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat agar dapat bersaing pada lapangan kerja dan terentaskan dari kemiskinan.<sup>112</sup> Wakaf terdiri dari beberapa bagian yaitu:

a) Wakaf tunai dari masyarakat

Yaitu wakaf yang ditujukan untuk masyarakat kalangan ekonomi menengah keatas dengan nilai minimal Rp. 1 juta. Wakif dapat menentukan alokasi dana tunai untuk pendidikan atau kesehatan.

---

<sup>110</sup>Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Prenada Media Grup, Jakarta : 2015 ). h.142

<sup>111</sup>Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 26.

<sup>112</sup> Ibid,h.86



b) Wakaf tanah dan bangunan

Tanah dan bangunan yang diwakafkan harus merupakan kepemilikan penuh, sah, dan telah memperoleh persetujuan dari ahli waris. Jika wakaf dipandang produktif maka aset akan dikembangkan dengan modal pengelola (bersumber dari wakaf tunai) atau dikerja samakan dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan. Dan jika tanah wakaf dianggap tidak produktif maka boleh dijual untuk digabungkan dengan aset yang lain agar memberikan manfaat yang lebih besar.

c) Wakaf bisnis dan Usaha

Yaitu aset yang menghasilkan profit yang semula dimiliki oleh individu menjadi milik umat yang kemudian memberikan maslahah bagi masyarakat luas.

d) Wakaf saham dan surat berharga

Saham yang dapat diwakafkan yaitu saham perusahaan syariah terbuka, *goodwill* saham perusahaan syariah tertutup, sukuk (obligasi) syariah, sukuk (obligasi) retail syariah, deposito syariah, reksadana syariah, wasiat wakaf dalam polis asuransi, wasiat wakaf dalam surat wasiat. Pengelolaan wakaf surat berharga yang berbentuk saham dan obligasi terbuka ditujukan untuk memaksimalkan perolehan dividen (bagi hasil), serta pengembangan portofolio untuk menghindari

terjadinya aset yang *default*. Dividen yang surplus yang akan didaya gunakan untuk program-program sosial sesuai peruntukannya (pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan).<sup>113</sup>

#### 4) Waris

Harta waris merupakan harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya.<sup>114</sup> Besaran jumlah harta waris yang diberikan kepada setiap keluarga berbeda-beda tergantung seberapa besar tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing individu dalam setiap keluarga.<sup>115</sup> Waris dalam Islam erat kaitannya dengan distribusi kekayaan dalam keluarga, terutama keinginan agar tercipta keadilan dalam pembagian harta waris. Hal ini sejalan dengan konsep ekonomi Islam bahwa harta harus tersebar dimasyarakat dan bukan terkumpul pada satu atau dua orang saja. Konsep waris Islam merupakan mekanisme distribusi kekayaan dan jaminan sosial riil dalam keluarga.<sup>116</sup> Distribusi kekayaan yang secara adil melalui waris ini menjadi motivasi kepada pewaris untuk tidak meninggalkan keturunannya dalam keadaan miskin.

---

<sup>113</sup>Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Prenada Media Grup, Jakarta : 2015 ). Hal.23 h.151

<sup>114</sup>Irfan Syauqi, . *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016,h.110

<sup>115</sup>Ika Yunia Fauzia, dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 6.

<sup>116</sup>Ruslan Abdul Ghofur. Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. (Jakarta: Bumi Aksara,2014),h.117.

## C. Indeks Pembangunan Manusia

### 1. Pengertian dan Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Pengembangan sumber daya manusia disatu pihak dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan atau kemampuan kerja manusia dalam melakukan berbagai macam kegiatan dalam masyarakat.<sup>117</sup> Dipihak lain pembinaan sumber daya manusia berhubungan erat dengan usaha peningkatan taraf hidup masyarakat. Yang lebih utama ditekankan pada peningkatan kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan asumsi bahwa aspek kedua akan terpenuhi dengan sendirinya.

Pembinaan sumber daya manusia dimulai dalam kalangan keluarga, ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan formal dan dikembangkan dalam masyarakat terutama pada lingkungan kerja.

Konsep IPM pertama kali dipublikasikan UNDP melalui *Human Development Report* pada tahun 1996, yang kemudian berlanjut setiap tahun. Dalam publikasi tersebut dijelaskan bahwa pembangunan manusia adalah sebagai “*a process of enlarging people’s choices*” atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat.<sup>118</sup>

Menurut United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan indeks pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam hal pendapatan,

---

<sup>117</sup>Payaman J Simanjuntak, *Sumber Daya Manusia, Kesempatan Kerja, dan Pembangunan Ekonomi. Kumpulan Makalah Terpilih Sidang Pleno ISEI 10-12 Desember 1981*. (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1982), h. 9

<sup>118</sup>Mohammad Bhakti Setiawan, dkk. *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia*, Jurnal Ekonomika, Vol.9, Nomor 1, April 2013, hlm. 18.

kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik, dan sebagainya. Empat hal pokok yang perlu di perhatikan dalam pembangunan manusia adalah produktivitas (*productivity*); Pemerataan(*equity*); keberlanjutan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).<sup>119</sup>

Pengembangan sumber daya manusia disatu pihak dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan atau kemampuan kerja manusia dalam melakukan berbagai macam kegiatan dalam masyarakat.<sup>120</sup> Dipihak lain pembinaan sumber daya manusia berhubungan erat dengan usaha peningkatan taraf hidup masyarakat. Yang lebih utama ditekankan pada peningkatan kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan asumsi bahwa aspek kedua akan terpenuhi dengan sendirinya. Pembinaan sumber daya manusia dimulai dalam kalangan keluarga, ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan formal dan dikembangkan dalam masyarakat terutama pada lingkungan kerja. Perkembangan teknologi dalam kegiatan perekonomian sangat menuntut kepada sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan.<sup>121</sup>

Konsep IPM pertama kali dipublikasikan UNDP melalui *Human Development Report* pada tahun 1996, yang kemudian berlanjut setiap tahun. Dalam publikasi tersebut dijelaskan bahwa pembangunan manusia adalah sebagai “*a process of enlarging people’s choices*” atau proses yang

---

<sup>119</sup> Payaman J Simanjuntak, *Sumber Daya Manusia, Kesempatan Kerja, dan Pembangunan Ekonomi. Kumpulan Makalah Terpilih Sidang Pleno ISEI 10-12 Desember 1981*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1982), h. 9

<sup>120</sup> Ibid, h.38

<sup>121</sup> Asfia Murni, *Ekonomika Makro Edisi Revisi*. (Bandung, PT. Refika Aditama, 2013), h.146

meningkatkan aspek kehidupan masyarakat.<sup>122</sup> Kebijakan pokok dalam upaya peningkatan kualitas hidup manusia secara lintas sektoral, diantaranya adalah :

1. Peningkatan kualitas fisik manusia (*individual fisycal quality*) yang meliputi jasmani, rohani dan motivasi, serta kualitas kecukupan kebutuhan dasar seperti terpenuhinya gizi, sandang, perumahan dan pemukiman yang sehat;
2. Peningkatan kualitas keterampilan (*skills*) sumber daya manusia yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan.
4. Peningkatan pranata dan penerapan hukum yang meliputi kelembagaan, perangkat, & aparat, serta kepastian hukum. Sedangkan secara sektoral, operasionalnya dilaksanakan melalui berbagai sektor pembangunan, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kependudukan, tenaga kerja, dan sektor-sektor pembangunan lainnya.<sup>123</sup>

Pada pelaksanaan perencanaan pembangunan, indeks pembangunan manusia juga berfungsi dalam memberikan tuntunan dalam menentukan prioritas perumusan kebijakan dan penentuan program pembangunan. Hal ini juga merupakan tuntunan dalam mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan dan

---

<sup>122</sup> Mohammad Bhakti Setiawan, dkk, *Indeks Pembangunan Manusia ....*, h. 18-19.

<sup>123</sup> Mulyadi S. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.25

pengambil keputusan. Indeks pembangunan manusia merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu: Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, Indeks Standar Hidup Layak, berikut penjelasan dan pengukuran dari masing-masing indeks:<sup>124</sup>

- a) Indeks Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang di harapkan dapat terus hidup. Ukuran yang di gunakan adalah angka harapan hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu.
- b) Indeks Pendidikan adalah tingkat pendidikan yang di ukur dengan jumlah penduduk yang melek huruf atau tingkat pendidikan yang telah tercapai atau lamanya pendidikan seorang penduduk.
- c) Indeks Standar Hidup Layak menunjukkan berapa seharusnya tingkat kemampuan seseorang atau suatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk menjalani kehidupan yang secara layak.

Rumus umum yang biasanya di gunakan untuk menghitung indeks pembangunan manusia adalah sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 (X1 + X2 + X3)$$

Keterangan : X1 = Indeks Harapan Hidup

X2 = Indeks Pendidikan

---

<sup>124</sup> Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*.

X3 = Indeks Standar Layak Hidup

Dalam menghitung masing-masing komponen indeks tersebut dapat di hitung dengan rumus sebagai berikut:<sup>125</sup>

- 1) Untuk mengukur Indeks harapan Hidup di gunakan ukuran dimensi kesehatan sebagai berikut:

$$I_{\text{Kesehatan}} = \frac{\text{AHH} - \text{AHHMin}}{\text{AHHMaks} - \text{AHHMin}}$$

- 2) Untuk mengukur Indeks Pendidikan di gunakan ukuran dimensi dimensi sebagai berikut:

$$I_{\text{HLS}} = \frac{\text{HLS} - \text{HLSMin}}{\text{HLSMaks} - \text{HLSMin}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{\text{RLS} - \text{RLSMin}}{\text{RLSMaks} - \text{RLSMin}}$$

$$I_{\text{Pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} - I_{\text{RLS}}}{2}$$

- 3) Untuk mengukur Indeks Standar Hidup Layak di gunakan ukuran dimensi Pengeluaran sebagai berikut:

$$I_{\text{Pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{Pengeluaran}) - \ln(\text{PengeluaranMin})}{\ln(\text{PengeluaranMaks}) - \ln(\text{PengeluaranMin})}$$

## 2. Teori Indeks Pembangunan Manusia

Dalam teori *Human capital* yang menyatakan bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan.

---

<sup>125</sup> *Ibid*,h.24

Sehingga dapat dikatakan dalam teori tersebut bahwa seseorang jika melakukan peningkatan dalam pendidikan maka ia akan mendapatkan peningkatan penghasilan juga atau tidak mengalami pengangguran yang tinggi.<sup>126</sup> Hal tersebut yang cukup menarik dimana masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi mempunyai tingkat pengangguran yang cukup tinggi, berbeda dengan halnya masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah justru memiliki tingkat pengangguran yang rendah juga.

### **3. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan**

Indeks pembangunan manusia bermanfaat untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia baik antar negara maupun antardaerah. Indeks pembangunan manusia menjadi salah satu tolak ukur bagi suatu daerah untuk melihat seberapa tinggi tingkat pembangunan manusia tersebut. Rendahnya indeks pembangunan manusia akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.<sup>127</sup>

Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial meliputi pendidikan, kesehatan, dan gizi merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu

---

<sup>126</sup> Aisyah Sisnita *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Lampung Periode 2009-2015*, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Naskah Publikasi Karya Ilmiah, 2017), h. 4.

<sup>127</sup> *Ibid*, h.59



wilayah.<sup>128</sup> Peningkatan kualitas dan perluasan ruang lingkup dari pelayanan pokok tersebut membutuhkan investasi sumber daya manusia yang berkualitas dan pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas golongan miskin.<sup>129</sup>

#### 4. Indeks Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kemakmuran suatu masyarakat tidak serta merta dapat diraih oleh negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah apabila tidak dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya alam tersebut.<sup>130</sup> Sebaliknya, sebuah Negara yang miskin sumber daya alam, namun memiliki sumber daya manusia yang menguasai, maka negara ini akan lebih cepat berkembang daripada negara yang kaya akan sumber daya alam.

Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemakmuran sebuah negeri. Sumber daya manusia memiliki peran ganda yaitu sebagai subjek dan objek pembangunan. Sebagai objek pembangunan, dimana SDM merupakan sasaran pembangunan untuk mendapatkan kesejahteraan. Sedangkan sebagai subjek pembangunan, artinya manusia berperan menjadi pelaku pembangunan yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya sebuah pembangunan dalam sebuah negeri.<sup>131</sup>

---

<sup>128</sup> Lincoln Arsyad, *Ibid*, h. 307

<sup>129</sup> *Ibid*, h. 267

<sup>130</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*...., h.176.

<sup>131</sup> *Ibid*, h. 105

Peran sumber daya manusia dalam perspektif Islam berbeda dengan perspektif konvensional. Hal ini berkaitan dengan filosofi pembangunan ekonomi Islam, yakni:<sup>132</sup>

- 1) Tauhid, berarti bahwa seluruh makhluk hidup dan alam semesta ini diciptakan oleh Allah SWT, dan ketika manusia masih berada di alam arwah mereka berjanji untuk senantiasa beriman kepada Allah SWT. Islam menghendaki manusia berada pada tatanan yang tinggi dan luhur. Oleh karena itu manusia dikaruniai akal, perasaan, dan tubuh yang sempurna. Islam, melalui ayat-ayat al-Qur'an telah mengisyaratkan tentang kesempurnaan diri manusia,<sup>133</sup> seperti antara lain disebutkan dalam firman Allah Q.S. at-Tin : 4, sebagai berikut:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝

*Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." QS. at- Tin : 4.*<sup>134</sup>

Kesempurnaan demikian dimaksudkan agar manusia menjadi individu yang dapat mengembangkan diri dan menjadi anggota masyarakat yang berdaya guna sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimilikinya.

- 2) Manusia (*Khilafah fi-al ardh*). Dasar filosofis ekonomi Islam menyatakan bahwa fungsi manusia baik dalam konteks individu maupun

---

<sup>132</sup>Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*..., h.179-180

<sup>133</sup>Djaelany Haluty, *Islam Dan Manajemen Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas*, Jurnal Irfani, Volume. 10 Nomor 1, Juni 2014, h. 24.

<sup>134</sup>*Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-karim (Jilid 2)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), h. 820

anggota masyarakat adalah sebagai khalifah Allah dimuka bumi. Salah satu tugas manusia dijelaskan dalam firman Allah QS. Al-baqarah ayat 30, sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ  
قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۳۰

Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah:30)<sup>135</sup>

Rencana Allah Menciptakan manusia adalah diberi mandat sebagai khalifah atau wakil Allah Swt. untuk mengelola bumi. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik maka yang harus dilakukan adalah bekerja dengan baik, bekerja dengan baik saja tentu tidak cukup tetapi juga harus dengan semangat yang tinggi.

- 3) Keadilan, yang di maksud dengan keadilan adalah pembangunan ekonomi yang merata, yakni konsep persaudaraan umat manusia hanya akan berjalan jika dibarengi dengan konsep keadilan. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah QS, Al-Ma'idah Ayat 8 sebagai berikut:

---

<sup>135</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran (dibawah naungan Al-Qur'an)*, (Depok: Gema Insani, 2006), h.975

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” ( QS. Al-Maidah : 8 )<sup>136</sup>

#### D. Tingkat Pengangguran Terbuka

##### 1. Pengertian Dan Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu aspek untuk mengukur kinerja suatu perekonomian adalah tingkat pengangguran.<sup>137</sup> Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya.<sup>138</sup> Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran di negara sedang berkembang (NSB) menjadi semakin serius.<sup>139</sup> Pengangguran disebabkan oleh hancurnya sistem sosial sebelum diganti seluruhnya oleh sistem lain. Pada saat yang

<sup>136</sup> Bachtiar Surin, *Adz-Zikraa( terjemah dan tafsir Al- Qurann dalam Huruf Arab dan latin Juz 6-10)*, (Bandung: Angkasa Bandung, 1991), h. 439

<sup>137</sup> Tedy Herlambang, dkk. *Ekonomi Makro Teori, Analisis, dan Kebijakan*. (Jakarta: Gramedia, 2001), h. 27

<sup>138</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta : Rajawali Pers, 2016

<sup>139</sup> Lincoln Arsyad, *Perencanaan Pembangunan, Dasar-dasar Kebijaksanaan Ekonomi*. Jakarta : Aksara Baru, 1986

sama, berkurangnya intensitas modal untuk industri modern menyebabkan berkurangnya kapasitas penerimaan tenaga kerja.<sup>140</sup>

Sebelumnya untuk membahas tingkat pengangguran terbuka, maka yang harus diketahui adalah pengangguran. Dimana salah satu aspek untuk mengukur kinerja suatu perekonomian adalah tingkat pengangguran. Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya.<sup>141</sup>

Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Badan Pusat Statistik adalah persentase Pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.<sup>142</sup>

Beberapa kendala seperti tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran di negara sedang berkembang (NSB)

---

<sup>140</sup> Arthur Lewis, *Perencanaan Pembangunan, Dasar-dasar Kebijakan Ekonomi*. (Jakarta : Aksara Baru, 1986), h. 87

<sup>141</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001) h. 14

<sup>142</sup> Badan Pusat Statistik Lampung, *Ibid*

menjadi semakin serius.<sup>143</sup> Pengangguran disebabkan oleh hancurnya sistem sosial sebelum diganti seluruhnya oleh sistem lain. Pada saat yang sama, berkurangnya intensitas modal untuk industri modern menyebabkan berkurangnya kapasitas penerimaan tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, berikut perhitungan dalam Tingkat pengangguran terbuka :

$$\text{TPT} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan : a = Jumlah Pengangguran

b = Jumlah Angkatan Kerja

## 2. Teori Pengangguran

Teori Lewis Mengemukakan bahwa beberapa Negara berkembang memiliki kelebihan tenaga kerja. Di Negara berkembang jumlah penduduk tidak seimbang jika di dibandingkan dengan modal dan kekayaan alam yang tersedia. Maka apabila sebagian kegiatan dari pekerjaan tersebut di pindahkan pada sektor lain, maka produksi dari sektor pertama tidak akan menurun.<sup>144</sup> Teori Ranis dan Fei juga mengemukakan bahwa dengan permasalahan yang di hadapi oleh Negara berkembang seperti, kelebihan penduduk dan kekayaan alam yang tersedia dapat di kembangkan secara terbatas, berpendapat bahwa mendorong kemajuan produktivitas kegiatan-kegiatan di sektor pertanian dapat menciptakan pembangunan ekonomi

---

<sup>143</sup>Lincoln Arsyad, *Ibid* , h.358.

<sup>144</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.

untuk mencapai taraf Negara industri dengan memperhatikan pengaruh sistem pasar terhadap sektor pertanian dan industri.<sup>145</sup>

Artinya permasalahan yang di hadapi seperti kelebihan tenaga bisa di atasi melalui perpindahan tenaga kerja pada sektor lain, namun pemahaman masyarakat tentang mendapatkan pekerjaan sesuai keinginan nya menjadi masalah baru bagi pemerintah sebagai penyedia lapangan pekerjaan. masyarakat cenderung memilah milah pekerjaan sesuai dengan standar pendidikannya namun tidak bisa mendapatkan pekerjaan seperti yang mereka inginkan yang pada akhirnya menyebabkan tingginya angka pengangguran.

### **3. Macam - macam Pengangguran**

Terdapat dua cara untuk menggolongkan pengangguran, yaitu pengangguran berdasarkan sumber atau penyebab yang mewujudkan pengangguran tersebut dan pengangguran yang berdasarkan ciri pengangguran yang wujud.

#### **a. Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya**

Berdasarkan penggolongan ini jenis pengangguran masih dibagi menjadi empat kategori yaitu :

##### **1) Pengangguran Normal atau Eriksional**

Pengangguran Normal atau Eriksional adalah pengangguran

---

<sup>145</sup> *Ibid*,h. 203

sebanyak dua atau tiga persen<sup>146</sup>, artinya keadaan dimana apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi tersebut sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh.<sup>147</sup> Dalam pengangguran jenis ini para penganggur tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, akan tetapi karena sedang mencari pekerjaan yang lebih baik yang sesuai dengan kualifikasi pribadi masing-masing. Pada umumnya masyarakat memutuskan untuk bermigrasi ke kota dengan harapan mendapatkan pekerjaan dalam sektor modern.<sup>148</sup>

## 2) Pengangguran Siklikal

Ketika perekonomian dalam kondisi yang baik maka permintaan secara agregat akan naik sehingga perusahaan akan menambah produksinya dengan begitu permintaan akan tenaga kerja akan meningkat. Akan tetapi perekonomian tidak selalu berkembang secara pesat ada kalanya terjadi penurunan permintaan agregat yang menyebabkan para perusahaan menurunkan tingkat produksinya yang menyebabkan tingkat profitabilitas perusahaan menurun, dalam kondisi yang seperti ini perusahaan akan mengurangi tenaga kerja atau bahkan menutup perusahaannya,

---

<sup>146</sup>Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.328

<sup>147</sup>Ibid, h. 68

<sup>148</sup>Penerjemah Silvia Tiwon. *Ekonomi Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 1987), h. 153



maka pengangguran akan semakin bertambah.<sup>149</sup> Maka pengangguran yang disebabkan oleh adanya pengaruh faktor produksi inilah yang disebut dengan pengangguran siklikal.

### 3) Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural adalah jenis pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi.<sup>150</sup> Karena tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : munculnya pesaing baru yang lebih inovatif, biaya produksi yang sangat tinggi, kegiatan ekspor menurun karena persaingan yang tinggi dengan negara-negara lain. Akibat kemerosotan itu banyak pekerja yang terpaksa diberhentikan.

### 4) Pengangguran Teknologi

Pengangguran ini terjadi karena adanya pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin dan bahan kimia. Di pabrik, banyak tenaga manusia yang digantikan oleh robot-robot yang melakukan pekerjaan. Hal ini menyebabkan tenaga kerja manusia yang dibutuhkan semakin menurun. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan *Pengangguran Teknologi*.<sup>151</sup>

---

<sup>149</sup>Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta : Rajawali Pers, 2016

<sup>150</sup>Ibid,h. 350

<sup>151</sup>Ibid,h.280

## **b. Pengangguran berdasarkan cirinya**

Jika dilihat berdasarkan ciri-cirinya pengangguran dibagi menjadi empat golongan, sebagai berikut :

### **1. Pengangguran Terbuka**

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertumbuhan lapangan kerja yang rendah, dan tidak sesuai dengan penambahan jumlah tenaga kerja yang banyak. Efek dari keadaan ini didalam jangka waktu yang cukup panjang mereka tidak melakukan pekerjaan. Sehingga mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu. Pengangguran terbuka dapat pula sebagai wujud akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang pesat sehingga mengurangi jumlah tenaga kerja, atau akibat dari kemerosotan suatu industri.<sup>152</sup>

### **2. Pengangguran Tersembunyi**

Jenis pengangguran ini terutama dalam sektor pertanian dan jasa. Setiap kegiatan ekonomi pasti memerlukan tenaga kerja, dan jumlah yang dibutuhkan tergantung beberapa faktor diantaranya: ukuran perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan (apakah intensif buruh atau intensif modal) , dan tingkat produksi yang dicapai. Pada kebanyakan negara berkembang seringkali didapati jumlah pekerja yang lebih banyak dari yang dibutuhkan sebenarnya dalam suatu industri.

---

<sup>152</sup>Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta : Rajawali Pers, 2016

### 3. Pengangguran Bermusim

Pengangguran ini terutama pada sektor pertanian dan perikanan.<sup>153</sup> Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak melakukan pekerjaan, disisi lain petani hanya bekerja setelah ia menanam selain itu mereka menganggur. Pengangguran itulah yang disebut pengangguran bermusim atau musiman.

### 4. Setengah Menganggur

Kondisi perkotaan menurut kebanyakan orang bisa menjadi tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dengan bekerja dikota sehingga banyak orang bermigrasi ke kota-kota besar. Akan tetapi tidak semua dari mereka mendapat pekerjaan. Sehingga yang dinamakan setengah menganggur adalah mereka yang tidak bekerja secara optimal atau mereka bekerja kurang dari 35 jam seminggu.

## 4. Hubungan Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Besar jumlah pengangguran menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan yang ada di suatu wilayah tersebut. Karena pengangguran yang disebabkan oleh bertambahnya angkatan kerja baru yang terjadi tiap tahunnya, sementara itu penyerapan tenaga kerja tidak bertambah. Dan masalah pengangguran bertambah serius yang disebabkan perkembangan

---

<sup>153</sup>David C, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1988), h. 179.

penduduk yang kian bertambah cepat dan jumlah yang sangat besar.<sup>154</sup> Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang.

Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Dengan rendahnya pendapatan akan mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.<sup>155</sup>

## 5. Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Selama ini orang beranggapan bahwa mengatasi masalah pengangguran adalah tanggung jawab pemerintah semata. Tetapi sebenarnya masalah tersebut bukanlah semata tugas dan tanggung jawab pemerintah saja melainkan juga tugas dan tanggung jawab semua pihak, Termasuk tanggung jawab umat Islam. Umat Islam adalah umat yang terbaik dalam bekerja, karena diyakini kerja membangun diri pribadi, masyarakat, bangsa dan negara adalah perintah agama.<sup>156</sup>

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikan sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu. Dalam Al-Quran manusia diperintahkan oleh Allah untuk bekerja atau

---

<sup>154</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 86, cet. Ke-8

<sup>155</sup> Adit Agus Prasetyo, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2003-2007*. Universitas Diponegoro Semarang, Skripsi dipublikasikan tahun 2010.

<sup>156</sup> Yusuf Qardhawi, *Ibid*, h.1-3

berusaha sesuai dalam firman Allah QS. At- Taubah ayat 105, sebagai berikut:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسِيرَیَ اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى  
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ۱۰۵

Artinya: dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (QS. At- Taubah : 105)<sup>157</sup>

Setiap manusia diwajibkan untuk bekerja dan menolak semua kemalasan seperti dalam firman Allah QS. Al-Jumuah [62] : 10, sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۰

Artinya; "apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (QS. Al- Jumuah : 10)<sup>158</sup>

Perintah ini menunjukkan pengertian ibadah atau boleh carilah rezeki dengan ingatan yakni memperoleh keberuntungan. Islam melarang keras seseorang untuk menjadi pengangguran. Masalah pengangguran berhubungan dengan sumber daya manusia yang tidak memanfaatkan yang disebabkan karena lapangan kerja yang terbatas atau kualitas sumber daya manusianya yang kurang.

<sup>157</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, (Tangerang: Lentera Hati, 2002), h. 710.

<sup>158</sup> *Tafsir ringkas Al-Qur'an Al-Karim (Jilid 2)*, ( Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), h. 788.

Dalam rangka mencapai sumber daya manusia yang berkualitas maka dibutuhkan berbagai upaya, diantaranya dengan melakukan pengembangan sumber daya manusia, dengan cara memberikan pendidikan yang diorganisasikan secara formal pada tingkat dasar, menengah dan pendidikan.<sup>159</sup>

Fenomena pada masyarakat muslim saat ini, banyak pengangguran pada usia- usia produktif, dan khususnya pengangguran pada kelompok terbuka. Islam sangat mencela. pengangguran yang tidak mau bekerja dengan alasan kemalasan, gaji sedikit dan kecil, serta pekerjaan yang tidak memadai.<sup>160</sup>

## **E. Produk Domestik Regional Bruto**

### **1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi didalam perekonomian daerah.<sup>161</sup> Hal ini berarti peningkatan PDRB mencerminkan pula peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto dihitung atas dasar konsep arus barang artinya perhitungan PDRB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Batas wilayah perhitungan PDRB adalah daerah (perekonomian domestik) sehingga hal ini memungkinkan

---

<sup>159</sup> Nurul huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*...., h. 25

<sup>160</sup> Naf'an, *Ekonomi Makro, Tinjauan Ekonomi Syariah, cetakan ke 1*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h.139

<sup>161</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 26.

untuk mengukur sejauh mana kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah daerah mampu untuk mendorong aktivitas ekonomi domestik<sup>162</sup> yang pada akhirnya dapat diketahui seberapa besar perannya dalam mengentaskan kemiskinan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah besaran dari nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan usaha yang berada dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.<sup>163</sup> Data PDRB tersebut menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. PDRB didukung oleh sembilan sektor utama yaitu :

- a. Pertanian
- b. Pertambangan dan penggalian
- c. Industry
- d. Listrik, Gas dan air minum
- e. Bangunan
- f. Perdagangan, hotel dan rumah makan
- g. Pengangkutan dan komunikasi
- h. Bank dan lembaga keuangan lainnya
- i. Jasa

## **2. Penghitungan Statistik Neraca Nasional**

Penghitungan statistik neraca nasional yang digunakan di sini mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa

---

<sup>162</sup>Rahardjo Adisasmita, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014

<sup>163</sup> in Figures 2015, h. 371

yang dikenal sebagai “Sistem Neraca Nasional”. Namun, penerapan statistik neraca nasional tersebut telah disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi Indonesia. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.<sup>164</sup>

### **3. Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto**

Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah

---

<sup>164</sup> [http://Badan Pusat Statistik.com](http://BadanPusatStatistik.com)



- a) PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
- b) PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
- c) Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori- kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
- d) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk.<sup>165</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kemiskinan telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, diantaranya adalah :

Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten / Kota Jawa Tengah<sup>166</sup> oleh Wishnu Adhi Saputra,dkk. Penelitian ini menggunakan alat analisis *Least Square Dummy Variable* (LSDV) dengan hasil penelitian adalah bahwa Jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat

---

<sup>165</sup> <http://BadanPusatStatistik.com>

<sup>166</sup>Whisnu Adhi Saputra. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten / Kota Jawa Tengah, vol.2, no.1, Oktober 2010  
h.26

kemiskinan. Sedangkan PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sesuai dengan hipotesis, tanda negatif tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi PDRB, maka akan menurunkan tingkat kemiskinannya. IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sesuai dengan hipotesis tanda negatif mengindikasikan bahwa semakin tinggi IPM, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Pengangguran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis serta teori penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dari penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Adit Agus Prastyo (2010) dengan judul “*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan*”.<sup>167</sup> Hal yang dapat dikaji terhadap penelitian ini adalah pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif dan ekonometrika dengan menggunakan metode Panel Data.

Penelitian yang dilakukan oleh Prima Sukmaraga dengan judul Analisis IPM, PDRB Perkapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah<sup>168</sup>. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan

---

<sup>167</sup> Adit Agus Prasetyo, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2003-2007*. Universitas Diponegoro Semarang, Skripsi dipublikasikan tahun 2010.

<sup>168</sup> Prima sukmaraga. *Perencanaan Pembangunan, Dasar-dasar Kebijakan Ekonomi*. Jakarta : Aksara Baru, 1986,h..17

bahwa variabel IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, dan jumlah pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

Penelitian yang dilakukan oleh M Alhudori yang berjudul “*Pengaruh IPM, PDRB, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jambi*”<sup>169</sup> Hal yang dapat dikaji terhadap penelitian ini adalah pengaruh IPM, PDRB, dan jumlah pengangguran terhadap kemiskinan di Jambi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel IPM dan Pengangguran dengan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jambi. Sedangkan untuk variabel PDRB disimpulkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penduduk miskin di Provinsi Jambi.

Penelitian yang dilakukan oleh I Made Tony Wirawan dan Sudarsana Arka yang berjudul “*Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB Perkapita, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali*”<sup>170</sup>. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa pendidikan, PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran secara serempak berpengaruh

---

<sup>169</sup> M Alhudori, *Pengaruh IPM, PDRB, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jambi*, (Jurnal of Economics and Business Vol.1 No.1) September 2017

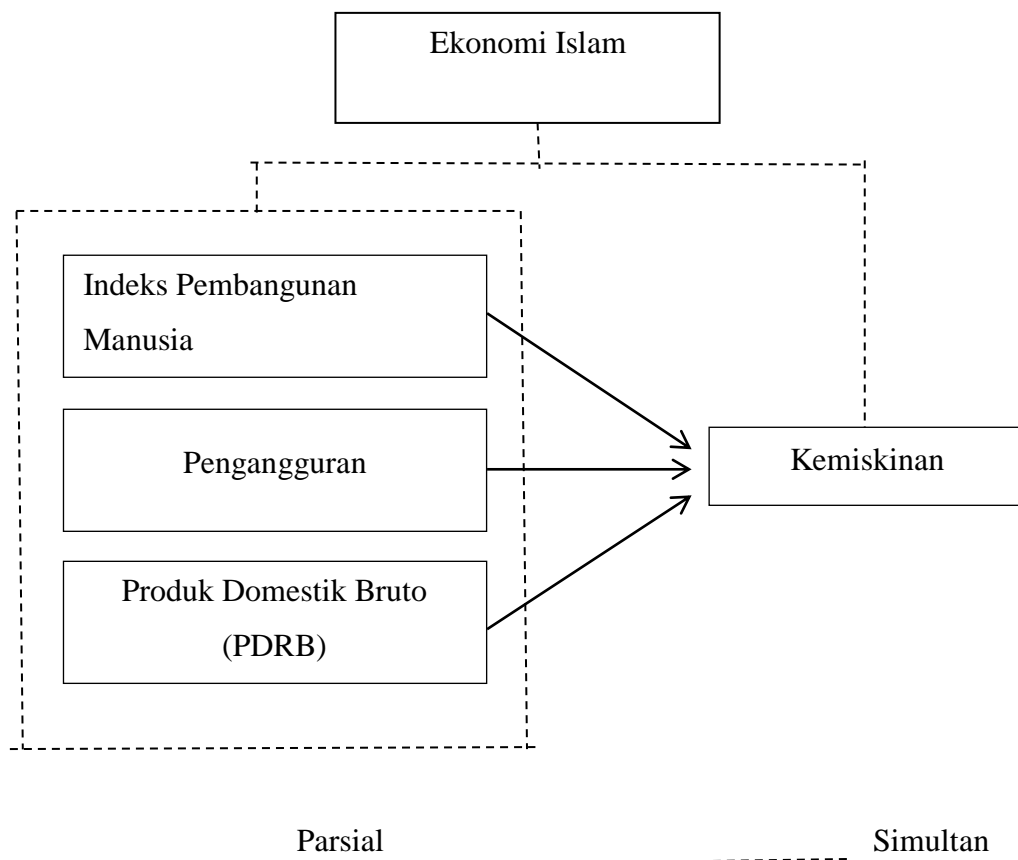
<sup>170</sup> I Made Tony Wirawan dan Sudarsana Arka, *Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB Perkapita, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali*, (E-Jurnal UNDIP ISSN: 2303-0178). 2018.

signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, PDRB per kapita secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, sedangkan tingkat pengangguran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap jumlah penduduk miskin yaitu variabel PDRB perkapita.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu persamaan tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat kemiskinan dan juga terdapat adanya perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat kemiskinan dengan mengkaji permasalahan secara mendalam dalam perspektif Ekonomi Islam di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017.

### G. Kerangka Berfikir

Berdasarkan landasan teori yang diutarakan, maka dapat disusun suatu kerangka pikir dalam penelitian ini seperti yang disajikan dalam gambar dibawah ini :



Gambar.2  
Krangka Pemikiran

#### Keterangan :

##### 1. Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan

Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan,

kesehatan, dan gizi) merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah.<sup>171</sup> Peningkatan kualitas dan perluasan ruang lingkup dari pelayanan pokok tersebut membutuhkan investasi sumber daya manusia yang berkualitas dan pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas golongan miskin.<sup>172</sup>

## 2. Pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan

Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.<sup>173</sup> Sebagian besar ekonom berkeyakinan bahwa kualitas input tenaga kerja, atau sumber daya manusia merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan pembangunan ekonomi.<sup>174</sup> Sehingga dengan pembangunan ekonomi yang bagus secara otomatis akan mengurangi tingkat pengangguran masyarakat karena suatu wilayah mampu mensejahterakan masyarakatnya.

---

<sup>171</sup>Okta Ryan Pranata Yudha, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia tahun 2009-2011*, (Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Semarang, 2013), h.41

<sup>172</sup>*Ibid.*, h. 69

<sup>173</sup>Adit Agus Prasetyo, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2003-2007*. Universitas Diponegoro Semarang, Skripsi dipublikasikan tahun 2010.

<sup>174</sup> Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Makro Ekonomi Edisi Keempatbelas*. (Jakarta : Erlangga, 1996), h. 436.

### 3. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap kemiskinan

Pendekatan pembangunan tradisional lebih difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto suatu wilayah, laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak serta merta diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto semata akan tetapi juga harus memperhatikan pemerataan dalam pendistribusian pendapatan. Sehingga menurunnya Produk Domestik Regional Bruto dapat berdampak pada kualitas dan konsumsi rumah tangga. Apabila tingkat pendapatan masyarakat menurun maka rumah tangga juga akan menurunkan standar konsumsi mereka.<sup>175</sup>

### 4. Pengaruh IPM, Pengangguran dan Produk Domestik regional Broto terhadap Tingkat kemiskinan.

Indeks pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik, dan sebagainya. Empat hal pokok yang perlu di perhatikan dalam pembangunan manusia adalah produktivitas (*productivity*); Pemerataan(*equity*); keberlanjutan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).<sup>176</sup>

Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan.

Dengan perhitungan PDRB yang mencakup daerah (perekonomian

---

<sup>175</sup>Prima Sukmaraga, *Perencanaan Pembangunan, Dasar-dasar Kebijakan Ekonomi*. Jakarta : Aksara Baru, 1986

<sup>176</sup>Payaman J Simanjuntak, *Sumber Daya Manusia, Kesempatan Kerja, dan Pembangunan Ekonomi. Kumpulan Makalah Terpilih Sidang Pleno ISEI 10-12 Desember 1981*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1982), h. 9

domestik) sehingga hal ini memungkinkan untuk mengukur sejauh mana kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah daerah mampu untuk mendorong aktivitas ekonomi domestik<sup>177</sup>

## H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang yang diperoleh melalui pengumpulan data.<sup>178</sup>

Menurut Teori Nurkse yaitu teori lingkaran kemiskinan (Vicious circle of poverty) terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kemiskinan yang berkaitan secara beruntun dengan ketiga variabel IPM, Pengangguran dan PDRB. Maka Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan

Teori Human Capital menyatakan bahwa seseorang bisa meningkatkan penghasilan melalui peningkatan pendidikan, yang kemudian akan berdampak pada kesejahteraan nya dan pada akhirnya akan membantu orang tersebut keluar dari masalah kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia mempunyai hubungan atau pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan karena apabila salah satunya mengalami peningkatan akan di ikuti dengan penurunan dari salah satunya. Sejalan dengan penelitian

---

<sup>177</sup>Rahardjo Adisasmita, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014

<sup>178</sup>Prima Sukmaraga, *Ibid*



yang di lakukan Wishnu Adhi Saputra,<sup>179</sup> yang berjudul Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten / Kota Jawa Tengah<sup>179</sup>. IPM berpengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan . Tanda negative mengindikasikan bahwa semakin tinggi IPM maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Berdasarkan pendapat di atas maka di peroleh hipotesis sebagai berikut:

H1 = Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negative terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan

H2 = Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan

## **2. Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan**

Sadono Sukirno berpendapat, efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan. Pengangguran memiliki hubungan atau pengaruh yang positif terhadap kemiskinan, karena apabila salah satunya mengalami kenaikan maka akan di ikuti dengan kenaikan yang lain. Sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Prima Sukmaraga dengan judul Analisis IPM, PDRB Perkapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa

---

<sup>179</sup>Whisnu Adhi Saputra. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten / Kota Jawa Tengah, vol.2, no.1, Oktober 2010  
h.26

Tengah<sup>180</sup>. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, dan jumlah pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Berdasarkan pendapat di atas maka di peroleh hipotesis sebagai berikut:

H1 = Pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan.

H2 = pengangguran berpengaruh negative terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan

### 3. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap kemiskinan

Prima Sukmaraga berpendapat bahwa menurunnya Produk Domestik Regional Bruto dapat berdampak pada kualitas dan konsumsi rumah tangga. Penelitian yang di lakukan oleh M Alhudori yang berjudul “ *Pengaruh IPM, PDRB, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jambi*”<sup>181</sup> . Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel IPM dan Pengangguran dengan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jambi. Sedangkan untuk variabel PDRB disimpulkan bahwa secara parsial tidak

---

<sup>180</sup>Prima sukmaraga. *Perencanaan Pembangunan, Dasar-dasar Kebijakan Ekonomi*. Jakarta : Aksara Baru, 1986,h..17

<sup>181</sup> M Alhudori, *Pengaruh IPM, PDRB, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jambi*, (Jurnal of Economics and Business Vol.1 No.1) September 2017

berpengaruh terhadap penduduk miskin di Provinsi Jambi. Apabila tingkat pendapatan masyarakat menurun maka rumah tangga juga akan menurunkan standar konsumsi mereka.

H1 = Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan.

H2 = Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan.

#### 4. Pengaruh IPM, Pengangguran dan PDRB terhadap Kemiskinan

Indeks pembangunan manusia adalah produktivitas (*productivity*); Pemerataan(*equity*); keberlanjutan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).<sup>182</sup> Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan. Dengan perhitungan PDRB yang mencakup daerah (perekonomian domestik) sehingga hal ini memungkinkan untuk mengukur sejauh mana kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah daerah mampu untuk mendorong aktivitas ekonomi domestik<sup>183</sup>

H1 = IPM, Pengangguran dan PDRB berpengaruh positif terhadap Kemiskinan

Ho = IPM, Pengangguran dan PDRB berpengaruh negatve terhadap Kemiskinan

---

<sup>182</sup>Payaman J Simanjuntak, *Sumber Daya Manusia, Kesempatan Kerja, dan Pembangunan Ekonomi. Kumpulan Makalah Terpilih Sidang Pleno ISEI 10-12 Desember 1981*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1982), h. 9

<sup>183</sup>Rahardjo Adisasmita, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ruslan Ghofur. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. (Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2013). h.98
- Adhi Whisnu Saputra, *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di kabupaten/Kota Jawa Tengah*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, dipublikasikan tahun 2011.
- Adisasmita Rahardjo, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 26.
- Agus Adit Prasetyo, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2003-2007*. Skripsi Universitas Diponegoro Dipublikasikan.
- Agus Adit Prasetyo, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2003-2007*. Universitas Diponegoro Semarang, Skripsi dipublikasikan tahun 2010.
- Alhudori M, *Pengaruh IPM, PDRB, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jambi*, (Jurnal of Economics and Business Vol.1 No.1) September 2017
- Amalia Euis. , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006h.194
- Amin Muhammad Suma, *Tafsir ayat ekonomi: teks, terjemahan dan tafsir*, Jakarta:Sinar Grafika Offset jilid 2, 2015. hal.72
- Arsyad Lincoln, . *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Arsyad Lincoln, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h.298.

- Bachrawi Sanusi. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.74.
- Bhakti Mohammad Setiawan, dkk. *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia*, Jurnal Ekonomika, Vol.9, Nomor 1, April 2013, hlm. 18.
- C David, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1988), h. 179.
- Ghazali Imam , *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS21*.(Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2013), h. 98.
- Haluty Djaelany, *Islam Dan Manajemen Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas*,Jurnal Irfani, Volume. 10 Nomor 1, Juni 2014, h. 24.
- Harlik,dkk, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Jambi”. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2013, ISSN: 2338-4603.
- Herlambang Tedy,dkk. *Ekonomi Makro Teori, Analisis, dan Kebijakan*. (Jakarta: Gramedia, 2001), h. 27
- Huda Nurul *Ekonomi Pembangunan Islam* (Prenada Media Grup, Jakarta : 2015 ). Hal.23
- J Payaman Simanjuntak, *Sumber Daya Manusia, Kesempatan Kerja, dan Pembangunan Ekonomi. Kumpulan Makalah Terpilih Sidang Pleno ISEI 10-12 Desember 1981*. (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1982), h. 9
- Lewis Arthur, *Perencanaan Pembangunan, Dasar-dasar Kebijaksanaan Ekonomi*. (Jakarta : Aksara Baru, 1986), h. 87
- Machmudah Fajriyatul, *Analisis Regresi Data Panel untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Probabilitas terhadap Devident Payout Ratio (DPR)*,(Skripsi dipublikasikanoleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), h. 3.
- Murni Asfia, *Ekonomika Makro Edisi Revisi*. (Bandung, PT. Refika Aditama, 2013),h.146
- Noor Juliansah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 162

- Pangestika Styfanda, Analisis Estimasi model Regresi Data Panel dengan Pendekatan Comment Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM), Skripsi dipublikasikan Universitas Negeri Semarang : 2015
- Pangiuk Ambok, *-Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Kemiskinan di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013* (Jurnal Of Syariah Economi, Vol.2, No.2 Tahun 2018)
- Pusat Bahasa, *Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 849.
- Quraish M. Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, (Tanggerang: Lentera Hati, 2002), h. 710.
- Quthb Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Quran (dibawah naungan Al-Qur'an)*, (Depok: Gema Insani, 2006), h.975
- Rahardja Pratama dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam, 2008), hal. 376, edisi 3.
- Ratna Yulianita, *-Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia (2000-2015)* (Skripsi dipublikasi oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2017)
- Rianto Nur al Arif, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori dan Analisis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.227
- Ryan Okta Pranata Yudha, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia tahun 2009-2011*, (Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Semarang, 2013), h.41
- S Mulyadi. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.25
- Samuelson Paul A. dan William D. Nordhaus, *Makro Ekonomi Edisi Keempatbelas* . (Jakarta : Erlangga, 1996), h. 436.

- Siregar Syofian, *Metode penelitian Kuantitatif*. (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2013) h.7.
- Sisnita Aisyah *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Lampung Periode 2009-2015*, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Naskah Publikasi Karya Ilmiah , 2017), h. 4.
- Sisnita Aisyah *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Lampung Periode 2009-2015*, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Naskah Publikasi Karya Ilmiah , 2017), h. 4.
- Siti An Nisaa' Humanira. *Kredit Berbasis Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus: Grameen Bank, Bangladesh)*. Jurnal *The Moslem Planners* #1. April – Mei : 2013.
- Sri Muhamad Wahyudi Suliswanto, *Pengaruh Pendapatan Domestik Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia* (Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.8) 2 Desember 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 795
- Suharto Buana dan Ari, *Perekayasaan Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, 2004) h.9
- Sukirno Sadono, *Makroekonomi Modern Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 472.
- Sukmaraga Prima, *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per kapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang dipublikasikan tahun 2011.
- Surin Bachtiar, *Adz-Zikraa( terjemah dan tafsir Al- Qurann dalam Huruf Arab dan latin Juz 6-10)*, (Bandung: Angkasa Bandung, 1991), h. 439
- Syauqi Irfan Beik dan Layli Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Edisi revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.147

- Syauqi Irfan dkk. *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 68.
- Tambunan Tulus, *Pembangunan Ekonomi Inklusif*, (Jakarta : LP3ES, 2016), h. 141.
- Tarigan Robinson, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 13.
- Tony I Made Wirawan dan Sudarsana Arka, *Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB Perkapita, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali*, ( *E-Jurnal UNDIP ISSN: 2303-0178*). 2018.
- Tri Bayu Cahya, *Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Alquran dan Hadis*. Jurnal Penelitian,, Vol.9, No.1, Februari 2015. H.43
- Wijayanto dan Ravi Dwi. *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2005-2008*. Skripsi Universitas Diponegoro Dipublikasikan.
- Wuri Retno, *Kemiskinan: Bagaimana Islam Memandangnya*. Jurnal The Moslem Planners #1, Keluarga Mahasiswa Muslim Planologi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung. April – Mei 2013, hlm. 4
- Yozi & Ayunda, *Faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB Kabupaten/Kota Jawa tengah tahun 2006-2012* (Jurnal of Economy and Policy Universitas Negeri Semarang 2015)
- Yulianti Desi, *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Upah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi DIY Periode Tahun 2007-2013 (Dalam Perspektif Ekonomi Syariah)*, (Skripsi dipublikasikan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016).
- Yunia Ika Fauzia, dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 6.
- Yunia Ika Fauzia, dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 6.